

NASKAH PUBLIKASI

**PENGARUH KEBIJAKAN LUAR NEGERI ASERTIF XI JINPING
TERHADAP STABILITAS HUBUNGAN CHINA-TAIWAN**

***THE INFLUENCE OF XI JINPING'S ASSERTIVE FOREIGN POLICY ON
THE STABILITY OF CHINA-TAIWAN RELATIONSHIP***

Khoirul Amin¹, Markysa Vebianova²



OLEH:

MARKYSA VEBIANOVA

1811102434011

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
2022**

Naskah Publikasi

**Pengaruh Kebijakan Luar Negeri Asertif Xi Jinping terhadap Stabilitas
Hubungan China-Taiwan**

*The Influence of Xi Jinping's Assertive Foreign Policy on The Stability of
China-Taiwan Relationship*

Khoirul Amin¹, Markysa Vebianova²



Oleh:

Markysa Vebianova

1811102434011

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH KEBIJAKAN LUAR NEGERI ASERTIF XI JINPING
TERHADAP STABILITAS HUBUNGAN CHINA-TAIWAN**

Naskah Publikasi

Diajukan oleh

Markysa Vebianova
1811102434011

Telah disetujui oleh
Pada hari / tanggal, Sabtu / 25 Juni 2022

Menyetujui,
Pembimbing



Khoirul Amin, S.IP., M.A
NIDN. 1115119001

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH KEBIJAKAN LUAR NEGERI ASERTIF XI JINPING
TERHADAP STABILITAS HUBUNGAN CHINA-TAIWAN**

Naskah Publikasi

Diajukan oleh

Markysa Vebianova
1811102434011

Telah disetujui oleh
Pada hari / tanggal, Kamis / 30 Juni 2022

Pembimbing I,



Khoirul Amin, S.IP., M.A
NIDN.1115119001

Penguji I,



Devy Indah Paramitha S. IP., M. Han
NIDN.1116059201

Dekan FEBP,



Drs. M. Farid Wajdi, M.M., Ph.D
NIDN. 0605056501

Ketua Program Studi HI,



Khoirul Amin, S.IP., M.A
NIDN.1115119001

Abstrak

Jurnal ini untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketegasan kebijakan luar negeri China dimasa kepemimpinan Xi Jinping terhadap Taiwan. Dengan melihat melalui pandangan seorang Presiden Xi Jinping dalam merealisasikan kepentingan China terhadap penyatuan dengan Taiwan. Pemisahan Taiwan dengan China tidak lepas dari perpecahan perang saudara Dinasti Qing antara Partai Komunis China dengan Partai Nasionalis atau yang lebih dikenal dengan Koumintang. Partai Koumintang yang kalah melarikan diri ke pulau Formosa atau dikenal sebagai Taiwan dengan membawa dua juta pengikutnya lalu mendirikan pemerintahannya sendiri dengan dukungan barat. Ini merupakan Penghinaan Partai Komunis China dibawah setiap kepemimpinan Presiden China penyatuan kembali China-Taiwan adalah kepentingan inti China. Dengan menggunakan teori Belief System Rudolf Ole Holsti dalam menjelaskan kebijakan luar negeri China direpresentasi Xi Jinping terhadap kepentingan penyatuan China-Taiwan. Pada masa kepemimpinan Xi Jinping melalui ketegasan kebijakan luar negeri terhadap Taiwan dengan penekanan kembali Konsensus 1992 dan One China Principle China tidak pernah mengesampingkan penggunaan instrument militer dalam mengakuisisi. Penyatuan China-Taiwan merupakan warisan politik para pendahulu China dan cita-cita Partai Komunis China terhadap identitas nasional yang terpisah di Taiwan. Xi Jinping menetapkan waktu 2049 bahwa penyatuan China-Taiwan harus tercapai dimasa kepemimpinannya dan tidak dapat di tunda kegenerasi selanjutnya.

Kata Kunci: Xi Jinping, China, Kebijakan Luar Negeri, Ketegasan, Taiwan.

Abstract

This journal is to analyze the factors that influence the assertiveness of China's foreign policy during Xi Jinping's leadership towards Taiwan. By looking through the views of President Xi Jinping in realizing China's interests towards unification with Taiwan. The separation of Taiwan from China cannot be separated from the division of the Qing Dynasty civil war between the Chinese Communist Party and the Nationalist Party or better known as the Koumintang. The defeated Koumintang party fled to the island of Formosa otherwise known as Taiwan with its two million followers and established its own government with western support. This is an insult to the Chinese Communist Party under any leadership of the Chinese President. China-Taiwan reunification is China's core interest. By using Rudolf Ole Holsti's Belief System theory in explaining China's foreign policy, Xi Jinping represents Xi Jinping's interest in the unification of China-Taiwan. During Xi Jinping's leadership, through assertiveness in foreign policy towards Taiwan by re-emphasizing the 1992 Consensus and One China Principle, China has never ruled out the use of military instruments in acquisitions. The unification of China-Taiwan is the political legacy of China's predecessors and the Chinese Communist Party's ideal of a separate national identity in Taiwan. Xi Jinping set a time of 2049 that China-Taiwan unification must be achieved during his leadership and cannot be postponed to the next generation.

Keywords: *Xi Jinping, China, Foreign Policy, Assertiveness, Taiwan.*

Pendahuluan

China dan Taiwan terikat oleh pemahaman yang dikenal sebagai Konsensus 1992 yang dicapai antara perwakilan Partai Komunis China dan partai Kuomintang Kedua belah pihak mengatakan mereka mewakili seluruh China secara politik sesuai dengan apa yang mereka pertentangkan dan perjuangkan sejak tahun 1949.¹ China terus menekankan sebagaimana yang telah dilakukan oleh pendahulunya bahwa China dan Taiwan yang diwujudkan dalam Konsensus 1992 membentuk dasar hubungan bahwa China akan terus mengejar penyatuan.² Taiwan dan China secara historis China menganggap Taiwan sebagai bagian integral dari wilayahnya. Namun disintegrasi yang sempat dialami Taiwan tidak merasa sebagai bagian dari China. Meskipun Taiwan menganggap dirinya sebagai negara berdaulat China akan selalu menganggap bahwa Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri.³ Oleh karena itu kepentingan penyatuan harus segera dilakukan karena apabila kehilangan Taiwan maka akan memberikan pengaruh yang signifikan dan kompleks bagi China.⁴

Pada November 2013 awal masa kepemimpinan Presiden Xi Jinping meluncurkan kebijakan yang agresif terhadap Taiwan ia mendeklarasikan zona identifikasi pertahanan udara di beberapa bagian Laut Cina Timur yang memicu

¹ Sherridan, I. (2018). Hubungan China dan Taiwan dalam Hal Status Kedaulatan Negara Taiwan.

² Thompson, D. (2020). The Rise of Xi Jinping and China's New Era: Implications for the United States and Taiwan. *Issues & Studies*, 56(01), 2040004.

³ BBC, 'China-Taiwan military tensions 'worst in 40 years' (daring), < <https://www.bbc.com/news/world-asia-58812100> >, diakses pada 27 Maret 2022, 12:00 WITA.

⁴ Dewi, I. F., & Dewi, K. U. (2019). Strategi Pemerintahan Xi Jinping terhadap Taiwan dalam Mengamankan Kedaulatan Tiongkok. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(2), 161-168.

ketegangan dengan Taiwan.⁵ Kebijakan yang dikeluarkan oleh China terhadap Taiwan masih terus deselaraskan dengan kekuatan China sehingga isu kemerdekaan Taiwan menjadi isu selalu menjadi alasan dalam ketegangan yang ada antara China dan Taiwan.⁶ China di bawah kepemimpinan Xi Jinping telah menggunakan berbagai taktik dalam menjaga stabilitas hubungan terhadap Taiwan sejak terpilihnya Tsai Ing-Wen menjadi presiden Taiwan. Xi Jinping memandang Tsai sebagai separatis yang bertekad pada kemerdekaan formal untuk Taiwan tidak ingin menjadi bagian dari Republik Rakyat China, menolak konsep *One Country, Two System* China⁷ rezim Taiwan saat ini belum mendukung *One China Policy* secara terbuka,⁸ Serta kedekatan hubungan Amerika Serikat dan komitmennya dalam mendukung Taiwan. Sebagai respon China telah meningkatkan frekuensi dan skala patroli pembom PLA, jet tempur, dan pesawat pengintai di sekitar Taiwan China juga semakin banyak mengarungi kapal perang dan kapal induknya melalui Selat Taiwan untuk menegaskan kembali sikap China yang semakin tegas dan agresif terhadap Taiwan melalui upaya militer untuk mencegah Taiwan melakukan kampanye atau mempromosikan kemerdekaan.⁹

⁵ Al Syahrin, M. N. (2018). Kompleksitas Keamanan Kawasan dan Tantangan Kerja Sama Keamanan Asia Timur. *Nation State: Journal of International Studies*, 1(1), 24-44.

⁶ Prasetya, D. M. (2012). Strategi Defensif China dalam Merespon Kebijakan Amerika Serikat atas Taiwan. *MEJ (Mathematics Education Journal)*, 2(1).

⁷ Khomarul Hidayat, 'Memanas, Taiwan tolak tawaran satu negara dua sistem, China: Reunifikasi harga mati' (daring), < <https://internasional.kontan.co.id/news/taiwan-tolak-tawaran-satu-negara-dua-sistem-china-reunifikasi-tak-bisa-dihindari> >, diakses pada 02 April 2022, 21:30 WITA.

⁸ Sarkar, M. G. (2020). Xi Jinping's PLA and China's regional security ambitions. In *Chinese Politics and Foreign Policy under Xi Jinping* (pp. 276-306). Routledge.

⁹ David Brown, 'China and Taiwan: A really simple guide to a growing conflict' (daring), < <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-59900139> > diakses pada 29 Maret 2022, 03:22 WITA.

Tekanan politik dan militer yang diberikan China terhadap Taiwan sepanjang masa kepemimpinan Tsai Ing-wen semakin intensif.¹⁰ Bagi Xi Jinping Taiwan tetap menjadi bagian penting dari Impian China, peremajaan nasional, dan penyatuan dengan Taiwan tetap dikemas dalam visi Xi untuk negara. Oleh karena itu China di bawah Xi kemerdekaan Taiwan telah menerima postur yang jauh lebih keras karena penyatuan menjadi bagian penting dari agenda ambisius Xi sebagai pemimpin China.¹¹ Xi Jinping mengatakan bahwa masalah Taiwan tidak dapat ditunda dari satu pemimpin generasi ke generasi lainnya. Mengingat bahwa pemerintahan Xi lebih memilih strategi yang lebih proaktif untuk penyatuan dan dapat secara bertahap memberlakukan dukungan terhadap aktor Taiwan pro-China yang dapat melaksanakan agenda politik China secara lebih langsung.¹² Karena China telah berkembang kekuatan di kawasan Asia Timur dalam beberapa tahun terakhir jika pemerintahan Xi mengambil tindakan intrusif untuk menyatukan Taiwan atau jika pemerintahan pro-China mengambil alih kekuasaan di Taiwan dengan terus menjaga stabilitas hubungan China-Taiwan.¹³

¹⁰ 'China Makin Agresif, Taiwan Bisa Apa?' (daring), Inews Indonesia, < <https://www.inews.id/news/internasional/china-makin-agresif-taiwan-bisa-apa> > diakses pada 02 April 2022, 00:37 WITA.

¹¹ Bush, R. C. (2017). What Xi Jinping said about Taiwan at the 19th Party Congress. *Brookings Institution*, 19.

¹² Reuters, 'Blinken warns of China's 'increasingly aggressive actions' against Taiwan' (daring), < <https://www.reuters.com/world/china/blinken-warns-chinas-increasingly-aggressive-actions-against-taiwan-2021-04-11/> >, diakses pada 27 Maret 2022, 20:56 WITA.

¹³ 'A New Level of Aggressiveness: Recent Changes in Xi Jinping's Formulation of Taiwan Policy,' Georgetown Journal Of International Affairs (daring), 06 Mei 2019, < <https://www.georgetownjournalofinternationalaffairs.org/online-edition/2019/5/3/a-new-level-of-aggressiveness-recent-changes-in-xi-jinpings-formulation-of-taiwan-policy-1> >, diakses pada 27 Maret 2022, 02:00 WITA.

Strategi-strategi kebijakan luar negeri serta agenda-agenda politik agresif China dibawah Xi Jinping terhadap Tiawan juga tidak terlepas dari posisi penting Taiwan yang terletak di lepas pantai China dan antara Timur Laut dan Asia Tenggara telah melayani berbagai tujuan strategis bagi kekuatan regional baik ofensif maupun defensif. Di era kontemporer Taiwan secara geografis tetap berada di persimpangan sebagian besar titik bahaya Asia Timur. Bahkan konflik di Semenanjung Korea dapat dipengaruhi oleh operasi yang mungkin diluncurkan dari Taiwan. Taiwan merupakan aset strategis yang berharga bagi agresor potensial di Asia Timur saat ini.¹⁴ Adanya upaya-upaya yang dilakukan Xi Jinping dalam mempertahankan Taiwan serta melalui kebijakan luar negeri yang lebit tegas dengan membuat opsi bahwa penyatuan China merupakan hal terbaik bagi China maupun Taiwan. Xi dengan ini melihat bahwa Taiwan merupakan titik strategis bagi China melihat nilai strategis Taiwan sebagai dari berbagai kepentingan China. Tujuan China mengenai Taiwan jelas bersifat revisionis, Ia ingin mengakhiri keberadaan Taiwan yang terpisah dan memasukkannya dalam kesatuan Republik Rakyat China.¹⁵ Berdasarkan paparan latar belakang diatas, jurnal ini akan menganalisa tentang Pengaruh Agresifitas Kebijakan Luar Negeri Xi Jinping Terhadap Stabilitas Hubungan China-Taiwan

Tinjauan Pustaka

¹⁴ Josep A. Bosco, *Taiwan and Strategic Security: The U.S. declarative policy on Taiwan of "strategic ambiguity" needs to change sooner rather than later,* (daring) 15 Mei 2015 < <https://thediplomat.com/2015/05/taiwan-and-strategic-security/> >, diakses pada 26 Maret 2022, 22:21 WITA.

¹⁵ Bush, R. (2019). *From persuasion to coercion: Beijing's approach to Taiwan and Taiwan's response*. Washington, DC: Brookings Institution.

Pertama Jurnal *Xi Jinping's PLA and China's regional security ambitions* ditulis oleh Mrittika Guha Sarkar.¹⁶ Tulisan ini menjelaskan mengenai Xi Jinping sedang mereformasi China dan tatanan global melalui PLA dan diplomasi militernya. keyakinan Mao pada Siapa pun yang memiliki tentara memiliki kekuatan. Melanggar dari diktum sembunyikan dan tunggu Deng Xiaoping China di bawah Xi Jinping semakin memandang diplomasi militernya sebagai alat vital untuk memajukan tujuan politiknya, menjaga keamanan nasionalnya, dan mencapai Impian China. Hal tersebut Xi pada 1 Agustus 2016 Berkaitan dengan pengumuman reformasi PLA, baik secara struktural maupun organisasional, sebagai bagian integral dari keseluruhan proses reformasi struktural ini. Xi menunjuk pasukan darat PLA sebagai kekuatan militer perkasa modern dan gaya baru. Dia lebih lanjut mempercepat pergeseran PLA dari kekuatan berbasis darat tradisional ke kekuatan angkatan laut. Hal ini terutama terlihat dalam pembangunan PLA Navy (PLAN), Strategi diplomasi lepas pantai China dalam konteks Belt and Road Initiative (BRI), upaya pemaksaannya untuk mencapai reunifikasi penuh dengan Taiwan, reklamasi pulau-pulau di ECS dan LCS, dan upayanya untuk menjaga hukum dan ketertiban di Hong Kong vis-vis demonstrasi pro-demokrasi. Visi Xi Jinping tentang era baru PLA yang mendesak untuk memperkuat ketahanannya, kesiapsiagaan, dan meningkatkan kemampuan tempurnya lebih lanjut disaksikan selama pertengkarannya dengan tentara India di Doklam pada tahun 2017. Demikian tulisan ini menjelaskan akan menelusuri transformasi PLA melalui reformasi dan restrukturisasi di bawah Xi Jinping dan

¹⁶ Sarkar, M. G. (2020). Xi Jinping's PLA and China's regional security ambitions. In *Chinese Politics and Foreign Policy under Xi Jinping* (pp. 276-306). Routledge.

berpendapat bahwa itu akan memiliki implikasi yang lebih luas. Dengan berikutnya akan menghubungkan transformasi PLA di bawah Xi dengan keamanan China yang tumbuh dan kepentingan kebijakan luar negeri yang berkembang karena PLA China bertujuan untuk mencapai kekuatan kelas dunia.

Jurnal kedua berjudul *Strategi Pemerintahan Xi Jinping terhadap Taiwan dalam Mengamankan Kedaulatan Tiongkok* ditulis Oleh Inneke Firsana Dewi, Karina Utami, Universitas Islam Indonesia.¹⁷ tulisan ini membahas mengenai dinamika hubungan Tiongkok dan Taiwan yang dimulai dengan perang saudara antara Partai Komunis dan Partai Nasionalis. Presiden Tsai Ing-wen menolak keberadaan Kebijakan Satu Tiongkok (One China Policy) dan dengan terus memperjuangkan kemerdekaan Taiwan dengan berbagai cara. Sebaliknya, Presiden Xi Jinping dengan tegas menolak kemerdekaan Taiwan dan bersikeras mempertahankan posisi Taiwan sebagai bagian dari kedaulatan Tiongkok. tulisan ini menganalisis dengan menggunakan konsep sektor keamanan oleh Buzan, Waever, dan de Wilde yang mencakup strategi keamanan sektor militer, politik, dan ekonomi untuk menjelaskan upaya pemerintah Tiongkok di bawah Presiden Xi Jinping dalam menanggapi gerak Taiwan. Menggunakan analisis dari konsep ini dapat dijelaskan bahwa upaya pemerintah Tiongkok di sektor militer dan politik berhasil mengatasi ancaman dari posisi Taiwan; sementara di sektor ekonomi, hasilnya tidak seperti yang diharapkan karena pemerintah Taiwan secara kontinu berupaya untuk tidak bergantung pada ekonomi Tiongkok.

¹⁷ Dewi, I. F., & Dewi, K. U. (2019). Strategi Pemerintahan Xi Jinping terhadap Taiwan dalam Mengamankan Kedaulatan Tiongkok. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(2), 161-168.

Jurnal ketiga berjudul *Xi Jinping's Taiwan Policy: Boxing Taiwan In with the One-China Framework* ditulis oleh Jing Huang.¹⁸ Tulisan ini membahas hubungan Lintas Selat di bawah kepemimpinan Xi Jinping tetap stabil dan progresif secara umum meskipun sentimen anti-Beijing tumbuh di Taiwan seperti yang disoroti oleh Gerakan Bunga Matahari yang memprotes pengesahan Perjanjian Perdagangan Jasa Lintas Selat antara Taiwan dan China serta kegagalan memalukan dari partai Kuomintang yang berkuasa yang telah menekankan platform untuk memperkuat hubungan ekonomi Taiwan-China dalam pemilu 2014. Kedua belah pihak telah dicegah untuk membuat kemajuan substansial dalam hubungan lintas-Selat sejak Xi berkuasa pada 2012 bertepatan dengan masa jabatan kedua Ma Taiwan dengan menumbuhkan sentimen anti-Beijing terutama di kalangan anak muda dan penurunan Presiden Ma. Popularitas Ying-jeou dan China dengan keasyikan Xi Jinping dalam memerangi korupsi dan merestrukturisasi ekonomi di tengah perlambatan ekonomi yang substansial. Namun perkembangan damai di Selat Taiwan tetap menjadi tren sejak 2008 ketika Ma Ying-jeou berkuasa. Konsensus 1992 bahwa hanya ada satu China dan bahwa Taipei dan Beijing setuju untuk tidak setuju tentang pemerintah mana yang merupakan perwakilan sahnya masih merupakan dasar dari hubungan lintas selat. Selain itu, kedua belah pihak memiliki pemahaman yang lebih baik dan toleransi yang semakin besar terhadap pandangan yang berbeda satu sama lain tentang implikasi di dalam dan luar negeri dari pernyataan bahwa hanya ada satu China.

¹⁸ Huang, J. (2017). 13. Xi Jinping's Taiwan Policy: Boxing Taiwan In with the One-China Framework. In *Taiwan and China* (pp. 239-248). University of California Press.

Sementara itu pertukaran ekonomi, sosial, dan politik antara kedua belah pihak di Selat Taiwan terus meningkat.

Jurnal keempat berjudul *Xi Jinping and the National Security Commission: policy coordination and political power* ditulis oleh David M. Lampton.¹⁹ Artikel ini membahas alasan, dan kemajuan hingga saat ini, dari pembentukan Komisi Keamanan Nasional di China, sebuah langkah yang pertama kali diumumkan pada akhir tahun 2013. Dorongan utama untuk pembentukan Komisi adalah untuk membantu mengoordinasikan birokrasi yang sangat terfragmentasi dengan lebih baik dan untuk memajukan upaya Xi Jinping untuk mengkonsolidasikan kekuasaan pribadinya atas senjata koersif dan diplomatik internal dan eksternal dari struktur pemerintahan. Komisi sedang dalam proses dan pematangan kelembagaan secara penuh akan memakan waktu yang lama. Di tengah konstruksi Komisi, ada kebingungan yang cukup besar di antara bawahan di bidang kebijakan luar negeri dan keamanan tentang garis wewenang dan tujuan akhir. Meskipun beberapa pencapaian kebijakan luar negeri baru-baru ini. Fokus Komisi sangat terfokus pada keamanan internal dan wilayah dibawah One China tetapi juga merupakan respon pembangunan institusi terhadap isu-isu global dan transnasional baru. Tidak terbukti dengan sendirinya bahwa Xi atau individu mana pun, dapat secara efektif mengelola rentang kendali yang dia bangun.

Rujukan jurnal terakhir *Beijing's policy towards President Tsai Ying-wen and the future of cross-Strait relations* ditulis oleh JP Cabestan. Tulisan ini membahas mengenai perkembangan terakhir dalam hubungan Lintas Selat melalui

¹⁹ Lampton, D. M. (2015). Xi Jinping and the National Security Commission: policy coordination and political power. *Journal of Contemporary China*, 24(95), 759-777.

lensa asimetri dan rebalancing. Hubungan Beijing-Taipei menjadi semakin asimetris. Sementara asimetri struktural ini telah memungkinkan yang pertama untuk memberikan segala macam tekanan pada yang terakhir ekonomi, ideologis dan militer asimetri ini tidak mencegah yang terakhir untuk menjaga ruang manuver vis-à-vis yang pertama. Menyeimbangkan melawan China dan ikut campur dengan Amerika Serikat sejak 1950 telah menjadi strategi keamanan dan kelangsungan hidup Taiwan bahkan jika setelah Amerika Serikat tidak mengakui Taiwan pada tahun 1978 Taipei dan Washington tidak dihubungkan oleh aliansi formal tetapi jauh lebih sempit dan kabur. pengaturan keamanan Undang-Undang Hubungan Taiwan. Bahwa di bawah Pemerintahan Tsai strategi penyeimbangan Taiwan tetap agak lunak karena ketergantungan ekonomi Taiwan yang keras terhadap China. Pada saat yang sama Taiwan tidak dapat mengabaikan penyeimbangan kembali Pemerintah Amerika Serikat. strategi di Asia dan konsekuensinya terhadap hubungan Amerika Serikat-China dan kawasan. Peluang keberhasilan strategi China terhadap Pemerintahan Tsai terutama setelah Presiden Amerika Serikat yang baru Donald Trump mulai menjabat dan mengingat panggilan telepon yang diterimanya dengan Ms. Tsai pada awal Desember 2016. Kesimpulan sementara spade tulisan ini banyak alasan domestik dan internasional ketidak mampuan KMT untuk mereformasi identitas Taiwan yang terkonsolidasi dan kemungkinan berlanjutnya Amerika Serikat dan mungkin dukungan strategis yang lebih kuat dan penyeimbangan kembali keseluruhan di bawah Trump Beijing mungkin tidak akan mencapai tujuannya yang utama. tujuan, setidaknya pada tahun 2020. Akibatnya Taiwan akan dapat terus berjalan dengan caranya sendiri

kesenjangan politik antara kedua belah pihak akan terus melebar dan hubungan melintasi Selat Taiwan mungkin akan tetap menjadi campuran ketegangan politik dan mungkin militer serta pertukaran padat dan interaksi yang tak terhindarkan.

Tinjauan Teori

Belief System

Ole Rudolf Holsti mengemukakan tiga komponen persepsi, yakni nilai, keyakinan dan pengetahuan atau fakta. Preferensi terhadap suatu realitas tertentu bila dibandingkan realitas yang lainnya disebut juga dengan nilai. Selanjutnya, sesuatu yang dianggap benar karena telah dapat dibuktikan kebenarannya dan telah diketahui oleh individu disebut dengan keyakinan. Keyakinan sendiri bisa didapatkan dari informasi yang telah diterima sebelumnya oleh individu. Lebih lanjut, pengetahuan atau fakta merupakan serangkaian informasi yang didapatkan dari lingkungan serta menjadi unsur utama dan pembentukan atau perubahan sistem perseptual seseorang.

Holsti dalam karya lainnya berjudul *Making American Foreign Policy* menjelaskan relasi persepsi yang terkait sistem keyakinan, citra serta hubungannya dengan proses pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan, seorang pemimpin sedikit banyaknya pasti akan melibatkan keyakinan dirinya sebagai tolak ukur dan media pertimbangan dalam menentukan opsi kebijakan yang hendak ia ambil. Dengan kata lain, keyakinan yang ada di dalam diri seorang pemimpin akan berpengaruh pada keputusannya dalam proses penetapan kebijakan. Lebih lanjut, Holsti mengemukakan pendapatnya soal citra. Citra yang dimaksud merujuk pada citra yang terbentuk bagi individu maupun

negara, yang tentunya juga akan mempengaruhi keputusan seorang pemimpin.

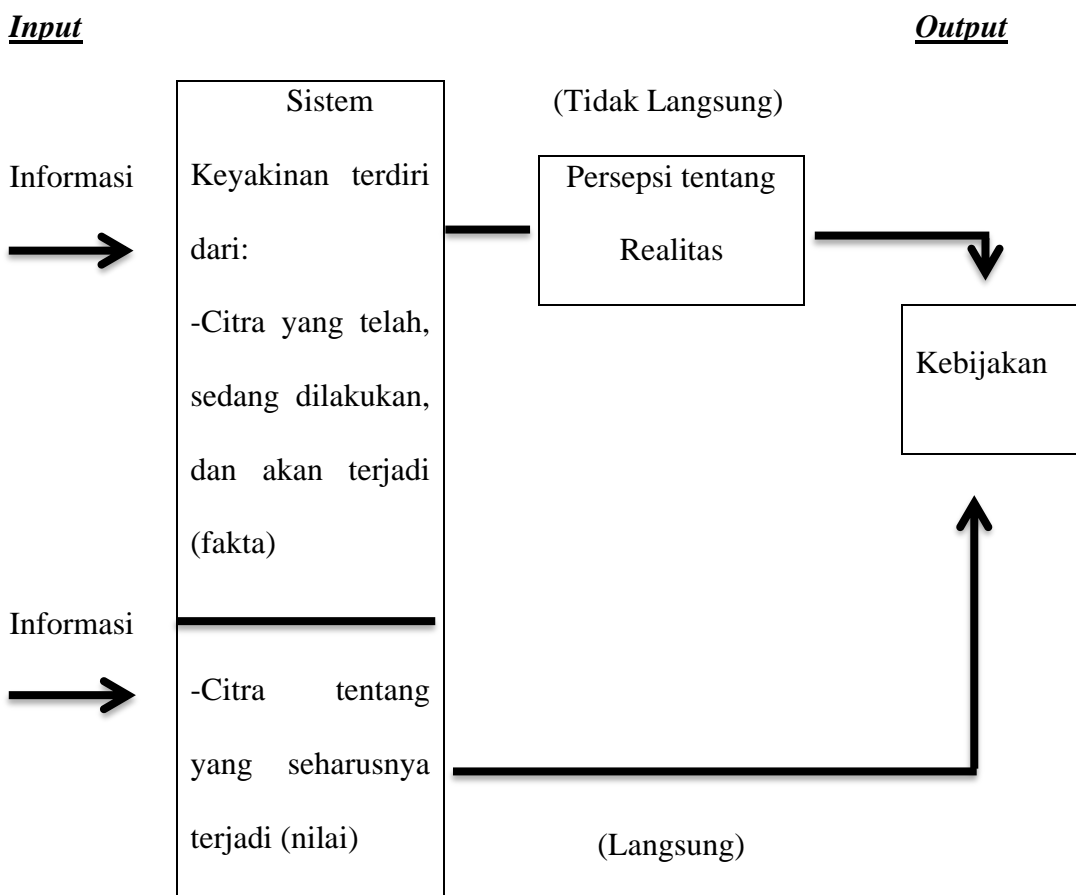
Holsti menjabarkan faktor-faktor yang ada sebagai berikut:

1. Sistem keyakinan (belief system). Faktor ini diartikan sebagai apa yang dipercayai dan diyakini oleh pembuat keputusan mengenai aktor lain ataupun situasi tertentu yang dihadapinya.
2. Citra (image) adalah potret atau penggambaran situasi terkait individu maupun negara. Citra negara dapat didefinisikan sebagai citra nasional berdasarkan kebijakan apa yang ditetapkan oleh negara berdasarkan situasi yang dihadapi oleh negara tersebut. Citra memiliki keterkaitan dengan sistem keyakinan, yakni keyakinan dalam diri seorang pemimpin secara tidak langsung dapat dipengaruhi oleh citra yang melekat pada negara.

Terkait bagaimana individu mengelola persepsinya untuk kemudian diekspresikan dalam sebuah kebijakan, Holsti menjelaskan bahwa terdapat dua bentuk pola hubungan antara sistem keyakinan, citra dan keputusan. Pertama adalah hubungan tidak langsung. Disini, informasi yang didapatkan oleh pemimpin lewat peristiwa maupun pengalaman yang telah berlangsung atau dialami olehnya secara tidak langsung akan membentuk persepsi pemimpin akan suatu hal dan mempengaruhi kebijakan yang akan ia ambil. Kedua adalah hubungan langsung, dimana pemimpin akan mendapatkan informasi yang secara kontan mempengaruhinya untuk mengambil suatu kebijakan pada saat itu juga.

Input informasi, sistem keyakinan terkait realitas serta keadaan lingkungan sekitar itulah yang membangun persepsi individu dalam proses pengambilan kebijakan guna merespon isu yang tengah terjadi. Citra negara dan individu akan

mempengaruhi keyakinan individu, dan begitu pula sebaliknya. Maka dari itu, sistem keyakinan akan mempengaruhi pembentukan persepsi individu sebagai penentuan referensi dalam proses penetapan kebijakan guna mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh negara. Lebih lanjut, nilai disebut juga sebagai suatu kecenderungan untuk membandingkan satu kebijakan yang diambil dengan kebijakan lain yang sudah ada sebelumnya.²⁰



Gambar 1.1

Bagan hubungan antara sistem kepercayaan dan pengambilan keputusan.

²⁰ Holsti, O. R. (2006). *Making American foreign policy*. New York: Routledge.

Xi Jinping yang merupakan presiden China pada saat ini memiliki peran penting dalam menjalankan pemerintahan termaksud dalam mengambil keputusan untuk mempertahankan Taiwan menjadi dari bagianya. Dalam hal ini Xi menggunakan teori Alternatif *Belief System* untuk menekan Taiwan melalui kebijakan luar negeri yang agresif dan menegaskan bahwa Taiwan merupakan bagian dari identitas nasional China. Sebagai presiden China Xi Jinping telah memiliki berbagai pengalaman dalam pemerintahan dan melihat langsung perkembangan China mengenai isu penyatuan Taiwan dari masa pemerintahan Deng Xioping. Xi Jinping mengikuti pendekatan mendasar yaitu memprioritaskan pencegahan kemerdekaan de jure Taiwan dengan cara Xi semakin menekankan penguatan kerangka strategis keijakan luar negrinya untuk meneruskan warisan politik penyatuan China-Taiwan.

Alur gerak agresifitas kebijakan luar negeri China terhadap Taiwan dipengaruhi oleh berbagai faktor mulai dari ketegangan hubungan China-Taiwan atas terpilihnya Tsai Ing-Wen sebagai presiden Taiwan yang Pro-kemerdekaan, kedua penolakan Taiwan terhadap konsep Konsensus 1992 China dan Taiwan tidak mengakui *One China Principle*, serta kedekatan Amerika Serikat dan dukunganya terhadap Taiwan dan Xi Jinping menginginkan posisi strategis Taiwan untuk memenuhi berbagai kepentingan China. Dengan ini China telah menggunakan berbagai taktik dalam mempertahankan Taiwan. Melalui agenda-agenda politik dan agresivitas kebijakan-kebijakan China dibawah kepemimpinan Xi Jingping penyatuan China-Taiwan harus tercapai.

Metode Penelitian

Metode analisis yang digunakan penulis adalah metode Kualitatif. Menurut *Miles dan Huberman* analisis dibagi menjadi beberapa tahap yaitu sebagai berikut: 1) Reduksi data adalah tahap penyederhanaan data sesuai dengan kebutuhan agar mudah mendapatkan informasi. Data yang sudah dikumpulkan akan dikategorikan atau dikelompokkan menjadi data yang sangat penting, kurang penting, dan tidak penting. Selanjutnya peneliti bisa menyimpan mana data yang perlu dan membuang data yang tidak perlu untuk penelitian. Dengan begitu data akan lebih sederhana dan jelas sehingga mudah ke tahap selanjutnya. 2) Penyajian data dilakukan untuk menampilkan data yang sudah direduksi ke dalam bentuk grafik, chart, dan lainnya. Tujuannya agar lebih mudah disampaikan dan dipahami oleh pihak lain. Ini juga akan memudahkan pembaca dalam menyerap informasi yang terdapat dalam data. 3) Penarikan kesimpulan atau conclusion drawing adalah informasi yang diperoleh dari data yang sudah disusun dan dikelompokkan yang kemudian disajikan menggunakan teknik tertentu. Kesimpulan dapat diletakkan paling akhir atau sebagai penutup sehingga pembaca dapat menemukan kesimpulan dari seluruh penelitian.²¹

Hasil dan Pembahasan

Penyatuan dengan Taiwan tetap menjadi salah satu kepentingan nasional inti China. Strategi bagaimana cara terbaik untuk mencapainya telah berkembang dari waktu ke waktu. Tiga fase kebijakan yang luas dapat diamati Pertama selama

²¹ Gunawan, I. (2013). Metode penelitian kualitatif. *Jakarta: Bumi Aksara*, 143, 32-49.

era Deng Xioping dengan membuka memperkenalkan inisiatif kebijakan China baru yang disebut Reformasi dan Pembukaan.²² Hasil dari proses perumusan kebijakan baru ini adalah Penyatuan Damai dan *One Country, Two System* penyatuan damai tampaknya menyarankan pendekatan yang lebih stabil dalam hubungan China-taiwan untuk penyatuan.²³ Pendekatan ini rusak di bawah Jiang Zemin selama krisis lintas selat 1995-1996 atas kekhawatiran China tentang transisi Taiwan ke presiden terpilih dan perilaku pemimpin Taiwan Lee Tung-hui dan Chen Su-Bian.²⁴ Ketiga Hu Jinta melibatkan strategi multifaset yang lebih kompleks yang ditujukan untuk pencegahan Kemerdekaan Taiwan melalui penggunaan peningkatan militer dan pembenaran hukum melalui Undang-Undang Anti-Pemisahan sementara pada saat yang sama menggunakan pengaruh kekuatan lunak untuk mempromosikan integrasi ekonomi dan budaya yang lebih erat antara dua komunitas di setiap sisi selat.²⁵ Fase ini dipercepat selama dua masa jabatan Ma Ying-jeou ditandai dengan perjanjian perdagangan bilateral yang terkenal pada tahun 2010 pengenalan penerbangan langsung antara Taipei dan sejumlah kota di daratan China bukan harus transit melalui Hong Kong dan pertumbuhan pariwisata.²⁶

Xi Jinping dan Kebijakan Luar Negeri Terhadap Hubungan Taiwan

²² Friedman, E. (2007). China's Changing Taiwan Policy. *American Journal of Chinese Studies*, 14(2), 119–134. <http://www.jstor.org/stable/44288853>

²³ A Policy of “one country, two system” on Taiwan, Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China (daring) 200, < https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/ziliao_665539/3602_665543/3604_665547/200011/t20001117_697847.html > diakses pada 19 April 2022, 02:00 WITA.

²⁴ Bo, Z. (2002). Guest Editor's Introduction. *Chinese Law & Government*, 35, 17 - 3.

²⁵ Zhao, S. (2006). Conflict prevention across the Taiwan Strait and the making of China's anti-secession law. *Asian Perspective*, 30(1), 79-94.

²⁶ Tamara, T. D. (2020). Politik Luar Negeri Taiwan Terhadap China Di Bawah Kepemimpinan Ma Ying Jeou (2008-2012). *Indonesian Journal of Global Discourse*, 2(1), 14-26.

Kenaikan Xi Jinping sebagai presiden China memberikan babak baru dalam hubungan China-Taiwan ia telah melihat kelanjutan berbasis di luar negeri dari Pendekatan multifaset Beijing tetapi dengan beberapa penyesuaian signifikan dalam nada dan penekanan.²⁷ Xi telah mengkonsolidasikan kekuasaan di puncak aparatur negara-partai pemerintah China yang tidak pernah terlihat sejak Mao. Sehubungan dengan Taiwan khususnya ia tampaknya mengambil lebih banyak kepentingan pribadi terlibat langsung dalam ketegangan lintas selat daripada banyak pendahulunya menjadi gurunya sendiri dalam masalah Taiwan waktunya bekerja di provinsi Fujian antara 1988 dan 2002.²⁸ Mempromosikan pendekatan yang lebih tegas untuk hubungan lintas-selat dia secara pribadi telah menangani secara langsung masalah waktu yang diperdebatkan untuk penyatuan sebagai bagian dari strateginya yang lebih luas untuk mewujudkan peremajaan bangsa Cina dengan alasan bahwa tujuan ini memerlukan upaya orang-orang di kedua sisi. Perbedaan politik lintas Selat yang sudah berlangsung lama harus diselesaikan selangkah demi selangkah pada akhirnya, sementara masalah ini tidak dapat diturunkan dari generasi ke generasi sebuah pernyataan yang diartikan bahwa penundaan penyatuan tanpa batas waktu tidak dapat ditunda.²⁹

Dalam konteks yang lebih luas dari kebijakan luar negeri China yang lebih tegas di bawah Xi pergeseran penekanan ini menimbulkan pesimisme ketika mempertimbangkan masa depan hubungan lintas-Selat dan stabilitas Asia Timur

²⁷ Weissmann, M. (2015). Chinese Foreign Policy in a Global Perspective: A Responsible Reformer" Striving For Achievement". *Journal of China and International relations*, 3(1).

²⁸ Blackwill, R. D., & Campbell, K. M. (2016). *Xi Jinping on the global stage: Chinese foreign policy under a powerful but exposed leader*. Council on Foreign Relations Press.

²⁹ Rahmadini, A., & Hennida, C. (2021). National Identity Analysis and Foreign Policy China Aggressive Stance in South China Sea under Xi Jinping.

yang lebih luas. Ia menyatakan untuk pertama kalinya bahwa dalam jangka panjang perselisihan di Selat Taiwan dapat dan harus diselesaikan secara bertahap. Xi tidak dapat menyerahkan masalah penyatuan Taiwan dari generasi ke generasi. Pernyataan ini mencerminkan tekad Xi untuk membuat kemajuan substansial di bawah kepemimpinannya dalam mendorong hubungan lintas-Selat menuju penyatuan China-Taiwan.³⁰ Xi mendesak para kepala departemen yang bertanggung jawab atas hubungan lintas-Selat untuk bertemu dan bertukar pandangan guna membangun saling percaya politik lintas-Selat. Seperti yang ditunjukkan Xi ia tidak menunggu untuk memberikan tekanan pada Taiwan dibawah Administrasi Tsai Ing-Wen yang merupakan dari partai DPP yang mendukung akan kemerdekaan Taiwan serta menolak akan kebijakan-kebijakan China.³¹

Realisasi Mempertegas Konsensus 1992

Kebijakan hubungan China-Taiwan diatur dalam Konsensus 1992 bahwa keduanya secara resmi mengakui *One China Principle* yang tak terpisahkan yang disebut konsensus 1992 perselisihan mereka tentang siapa di antara mereka yang merupakan perwakilan yang sah.³² *One China Principle* juga diterima secara luas oleh komunitas internasional yang sebagian besar menganggap bahwa China merupakan perwakilan sah seluruh China. Isu Taiwan ini semakin rumit dengan adanya tren pro-kemerdekaan yang kuat yang tidak mengakui bahwa Taiwan

³⁰ Huang, J. (2017). 13. Xi Jinping's Taiwan Policy: Boxing Taiwan In with the One-China Framework. In *Taiwan and China* (pp. 239-248). University of California Press.

³¹ Ahzani, W. F. (2021). Upaya Pemerintahan Tsai Ing-Wen Melawan Tekanan One-China Principle pada Era Xi Jinping. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(4), 552-564.

³² Yon, W. (2015). "One Country, Two Systems"—Comrade DENG Xiao-ping's Great Conception and its Practical Significance——In memory of his 110th Birthday.

milik China. Xi Jinping memperlakukan penyatuan kembali Taiwan dengan China sebuah elemen dari penyatuan kembali China setelah periode pembagian kolonial sebagai masalah kepentingan politik yang mendasar. China secara resmi berkomitmen untuk penyatuan kembali secara damai tetapi berdasarkan *Anti Secession-Law* pada tahun 2005 China memiliki hak untuk menggunakan kekuatan jika Taiwan mengeluarkan deklarasi kemerdekaan resmi atau jika ada prospek penyatuan kembali yang dianggap permanen hilang.³³

Posisi Xi dalam hubungan lintas-Selat semakin diperjelas pada Februari 2014 ketika ia bertemu dengan delegasi Taiwan yang dipimpin oleh Lien Chan. Ia menjelaskan bahwa penyatuan adalah bagian penting dari Impian China. Sekali lagi dia membuat empat poin dalam menjelaskan kebijakan Taiwan China tetapi empat poin ini memasukkan lebih banyak elemen politik daripada empat poin sebelumnya. Pidatonya terhubung pada Impian China dengan masa depan dengan Taiwan dengan menekankan pentingnya mempertahankan kerangka kerja *One China Principle*. Xi Jinping menyatakan optimisme atas penyelesaian akhir perselisihan di Selat meskipun ia menetapkan batasan waktu penyatuan Taiwan pada 2049.³⁴ Xi Jinping meminta kedua pihak di seberang Selat untuk mengkonsolidasikan dasar untuk mematuhi Konsensus 1992 dan menentang kemerdekaan Taiwan dan untuk mendorong pemahaman bersama tentang *One China Principle*. Xi menyatakan bahwa rekan-rekan dari kedua belah pihak telah memilih jalan pengembangan damai hubungan lintas-Selat pilihan yang tepat

³³ Dewi, I. F., & Dewi, K. U. (2019). Strategi Pemerintahan Xi Jinping terhadap Taiwan dalam Mengamankan Kedaulatan Tiongkok. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(2), 161-168.

³⁴ Qimao, C. (2003). China's New Approaches to a Peaceful Solution of the Taiwan Issue. *American Foreign Policy Interests*, 25, 513 - 525.

yang menjaga perdamaian lintas-Selat mempromosikan pembangunan bersama membantu mewujudkan peremajaan China dan membawa manfaat bagi orang-orang di kedua sisi. Xi berusaha melakukan yang terbaik selama apa yang dapat berkontribusi pada kesejahteraan Taiwan untuk pengembangan hubungan lintas-Selat yang damai dan untuk kepentingan keseluruhan bangsa China.³⁵

Salah satu alasan untuk tidak terputusnya Xi dengan penerapan kebijakan-kebijakan China karena itu merupakan warisan strategi besar dari pendahulunya Xi Jinping memahami bahwa China tidak dapat membuat keuntungan yang lebih strategis dengan Taiwan dengan mengesampingkan perselisihannya secara spesifik dalam konsensus 1992 karena Satu-satunya hal yang China inginkan dari Taiwan yakni penyatuan China-Taiwan. Dalam pidatonya di Kongres Partai ke-19 Xi menggambarkan perumusan ulang Konsensus 1992 mengacu pada *One China Principle* yang menggambarkan pengakuan dari kedua belah pihak yang tergabung dalam *One China Principle*.³⁶ Perumusan ulang Konsensus 1992 ini tidak lain untuk mengarahkan penekanan terhadap Taiwan untuk menerima Konsensus 1992. Dalam versi yang diperbarui Xi Jinping mendefinisikan ulang Konsensus 1992 sebagai pemahaman bahwa kedua sisi Selat Taiwan milik satu China dan akan bekerja sama menuju penyatuan nasional dalam pernyataan ini menggabungkan *One China Principle* dengan tujuan penyatuan nasional China-Taiwan.³⁷

³⁵ Huang, J. (2017). Xi Jinping's Taiwan Policy: Boxing Taiwan In with the One-China Framework. In L. Dittmer (Ed.), *Taiwan and China: Fitful Embrace* (1st ed., pp. 239–248). University of California Press. <http://www.jstor.org/stable/10.1525/j.ctt1w76wpm.16>

³⁶ Chen, Y. J., & Cohen, J. A. (2019). China-Taiwan relations re-examined: The 1992 Consensus and cross-strait agreements. *U. Pa. Asian L. Rev.*, 14, 1.

³⁷ Dr. Hsiao-chuan Liao, An Interpretation of Xi's Taiwan Policy—and Taiwan's Response.

One China Principle

Tindakan apapun yang dapat merusak prospek dasar terhadap penyatuan damai kedua belah pihak yang mengakibatkan kerugian kepentingan China termasuk Taiwan dan membahayakan perdamaian dan merusak stabilitas hubungan China-Taiwan. China secara konsisten berpegang pada *One China Principle* dan dengan tegas menentang segala upaya untuk memisahkan Taiwan dari China. China secara aktif dan tulus berjuang untuk penyatuan damai mencapai penyatuan kembali secara damai pemerintah China telah berulang kali mengimbau negosiasi lintas-Selat atas dasar kesetaraan *One China Principle*. Mempertimbangkan realitas politik Taiwan sepenuhnya dan dengan mempertimbangkan permintaan otoritas Taiwan agar negosiasi diadakan dengan pijakan yang setara kami telah mengajukan satu demi satu proposal seperti negosiasi harus diadakan antara China maupun Taiwan.³⁸

Xi Jinping membuat empat proposal baru untuk memajukan hubungan lintas-Selat: Pertama kedua belah pihak harus mempertimbangkan kepentingan keseluruhan China ketika menilai situasi keseluruhan hubungan lintas-Selat, Kedua kedua belah pihak harus dengan jelas mengenali tren pembangunan sepanjang sejarah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang prospek masa depan hubungan lintas-Selat, Ketiga China dan Taiwan harus meningkatkan rasa saling percaya, terlibat dalam interaksi yang menguntungkan, mencari kesamaan mengesampingkan perbedaan, dan akhirnya Kedua belah pihak harus terus mempromosikan pengembangan keseluruhan hubungan lintas-

³⁸ Bush, R. C. (2017). A One-China policy primer. *East Asia Policy Paper*, 10, 1-30.

Selat Dibandingkan dengan pembicaraan sebelumnya tentang masalah Taiwan, yang satu ini lebih jelas mengartikulasikan bagaimana mempromosikan kepercayaan politik antara kedua sisi Selat berdasarkan pembangunan ekonomi yang damai. Xi menegaskan bahwa kedua belah pihak berbagi nasib yang sama dan menyerukan upaya untuk menginspirasi mereka untuk memperkuat kebanggaan mereka terhadap bangsa China serta tujuan bersama mereka untuk peremajaan. Ia meskipun China dan Taiwan belum disatukan mereka terikat dalam *One China Principle* dan merupakan bagian tak terpisahkan satu sama lain. Xi menambahkan bahwa menjaga integritas dan kedaulatan teritorial nasional adalah inti dari tujuan penyatuan Xi dan menekankan bahwa kedua belah pihak harus menjunjung tinggi kerangka pemahaman *One China Principle*.

Sekarang Xi Jinping telah mengajukan beberapa persyaratan politik khusus untuk interaksi dengan Taiwan, termasuk memperkuat pembangunan kepercayaan, mempromosikan interaksi positif, mengoptimalkan kepentingan bersama, dan bersikap pragmatis. Xi menekankan pada konsolidasi melindungi dalam kemajuan strategis China dari *One China Principle* yang harus disepakati dalam hubungan lintas-Selat. Pada Oktober 2013 Xi mengemukakan gagasan bahwa kedua sisi Selat adalah satu keluarga ia menekankan kedua belah pihak harus menghargai kesempatan bersejarah ini menjaga momentum sebagai perkembangan hubungan damai di Selat Taiwan dan memperkuat rasa saling percaya politik untuk mempererat hubungan politik. Ia menyatakan untuk pertama kalinya bahwa dalam jangka panjang perselisihan di Selat Taiwan dapat dan harus diselesaikan secara bertahap "*Kami tidak dapat menyerahkan masalah itu dari*

generasi ke generasi” pernyataan ini mencerminkan tekad Xi untuk membuat kemajuan substansial di bawah kepemimpinannya dalam mendorong hubungan lintas-Selat menuju penyatuan. Xi mendesak kepala departemen yang bertanggung jawab atas hubungan lintas-Selat untuk bertemu dan bertukar pandangan guna membangun saling percaya politik lintas-Selat.³⁹

Setelah meneruskan kebijakan Taiwan Xi mengalihkan ketegasannya lebih untuk membangun dan mengkonsolidasikan kerangka kerja strategis di bawah *One China Principle* dengan tujuan penyatuan China-Taiwan. September 2014 Xi Jinping menyampaikan kepada delegasi Taiwan bahwa pedoman dasar sebagai solusi terhadap isu Taiwan adalah penyatuan secara damai dibawah krangka one country two system. Tidak ada tindakan-tindakan yang dapat memperburuk hubungan China-Taiwan tentang pemisahan diri tidak akan ditoleransi. Xi tampaknya telah sampai pada kesimpulan bahwa prinsip-prinsip tertentu perlu ditekankan kembali. Gagasan ini tercermin dalam pernyataan Xi ketika dia bergabung dengan diskusi panel dengan anggota Komite Nasional CPPCC pada Maret 2015 ia menyatakan *“Kita harus dengan teguh mengejar pembangunan damai, dengan teguh berpegang pada dasar politik bersama, dengan teguh membawa manfaat bagi orang-orang di seberang Selat dan tak tergoyahkan bergandengan tangan untuk mewujudkan revitalisasi nasional”*. Pada kesempatan yang sama ia meminta Taiwan untuk waspada terhadap gerakan sparatis pemisahan diri menuju kemerdekaan.⁴⁰

³⁹ Chen, D. P. (2014). Constructing Peaceful Development: The Changing Interpretations of “One China” and Beijing’s Taiwan Strait Policy. *Asian Security*, 10(1), 22-46.

⁴⁰ Hickey, D. V., & Niou, E. (2016). Taiwan in 2015: A Turning Point?. *Asian Survey*, 56(1), 57-67.

China juga telah mengusulkan dialog politik yang secara bertahap dapat beralih ke konsultasi prosedural untuk pembicaraan politik untuk menyelesaikan diskusi dalam bentuk pembicaraan politik dapat dilakukan secara bertahap. Negosiasi harus diadakan dan kesepakatan yang dicapai secara resmi untuk mengakhiri hubungan konfrontatif antara kedua belah pihak berdasarkan *One China Principle* untuk bersama-sama menjaga kedaulatan dan integritas teritorial China dan menyusun rencana untuk pengembangan hubungan lintas masa depan. Untuk mencari dan memperluas landasan politik hubungan kedua belah pihak China secara eksplisit mengusulkan kepada Taiwan bahwa sebelum terwujudnya penyatuan dan dalam menangani urusan-urusan hubungan antar selat terutama pada saat pembicaraan antara keduanya. *One China Principle* harus dijunjung tinggi yaitu bahwa hanya ada satu China di dunia Taiwan adalah bagian dari China dan kedaulatan serta integritas teritorial China tidak dapat dipisahkan. China berharap Taiwan sesegera mungkin dapat mengakui *One China Principle* bahwa kedua belah pihak akan mengadakan konsultasi dengan landasan yang sama dan membahas Penyatuan nasional bersama.⁴¹

Penggunaan Istrumen Militer China Sebagai Upaya Menekan Taiwan

China memperhitungkan bahwa Amerika Serikat telah mendukung selama berdirinya Taiwan dan telah menerima bahwa hanya ada satu China di dunia Taiwan adalah bagian dari China adalah satu-satunya pemerintah China yang sah dan melihat pengakuan ini bermanfaat bagi penyelesaian damai mengenai isu

⁴¹ Chen, C. J. J., & Zheng, V. (2022). Changing attitudes toward China in Taiwan and Hong Kong in the Xi Jinping era. *Journal of Contemporary China*, 31(134), 250-266.

Taiwan. Dalam menjalankan penyatuan China selalu menegaskan bahwa cara yang digunakan untuk menyelesaikan isu Taiwan yang merupakan urusan dalam negeri China sedangkan China tidak berkewajiban untuk mengikatkan diri dengan mengesampingkan penggunaan instrumen militer. Ditujukan untuk Taiwan terhadap skema yang menciptakan Taiwan merdeka dan melawan intervensi kekuatan asing dalam penyatuan China-taiwan dimaksudkan sebagai perlindungan yang diperlukan untuk perjuangan penyatuan kembali secara damai penggunaan instrument militer merupakan opsi terakhir yang dicapai untuk memaksa Taiwan penyatuan.⁴²

Taiwan harus menegakkan *One China Principle* serta menunjukkan bahwa Taiwan mengakui bahwa kedaulatan dan wilayah China tidak dapat dicabut. Dengan cara ini kedua sisi Selat Taiwan akan memiliki dasar sebagai hubungan politik yang sama dan dapat menemukan cara untuk menyelesaikan perbedaan politik mereka dan mewujudkan penyatuan damai melalui konsultasi dengan pijakan yang setara. Jika Taiwan menyangkal *One China Principle* dan mencoba memisahkan diri Taiwan dari China sebagai dasar untuk penyatuan damai tidak akan ada lagi. Adapun Amerika Serikat jika berjanji untuk mengikuti kebijakan *One China Principle* ia harus dengan sungguh-sungguh menerapkan tiga komunique antara pemerintah China dan Amerika Serikat dan memenuhi serangkaian perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Ini harus mempertahankan hubungan budaya, komersial dan non-pemerintah lainnya dengan Taiwan menentang kemerdekaan Taiwan *two China* atau *one China One*

⁴² Friedman, E. (2013). China's ambitions, America's interests, Taiwan's destiny, and Asia's future. *Asian Survey*, 53(2), 225-244.

Taiwan dan tidak menghalangi penyatuan Taiwan kembali ke China. China akan bertindak sebaliknya akan menghancurkan kondisi eksternal yang diperlukan bagi pemerintah China yang menghalangi perjuangan China untuk penyatuan dengan Taiwan.

China tidak pernah dan tidak akan pernah mengesampingkan penggunaan kekuatan militer untuk menyelesaikan hubungan lintas selat dan akhirnya bahwa risiko eskalasi dari ketegangan politik dan provokasi ke konfrontasi bersenjata langsung China untuk mengakuisi Taiwan. Dampak yang akan timbul dari negara-negara di kawasan Asia Timur dan kawasan lain dalam situasi di Selat Taiwan selalu terkait erat dengan stabilitas kawasan Asia Timur. Mematuhi akan *One China Principle* oleh negara-negara yang bersangkutan terhadap China maupun Taiwan akan sangat bermanfaat bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Timur dan menguntungkan bagi China untuk mengembangkan hubungan baik terhadap negara-negara lain dan oleh karena itu sesuai dengan kepentingan kawasan Asia Timur dan negara-negara lain. China telah menyadari bahwa Amerika Serikat memainkan peran penting dalam hubungan lintas-Selat. Atas dasar warisan politik dari para pendahulunya Xi Jinping sehingga penyatuan tidak dapat ditunda dari generasi ke generasi kepemimpinan selanjutnya. Bahkan sebelum dia menjadi pemimpin tertinggi di China Xi Jinping dengan jelas menunjukkan posisi Taiwan ketika dia berurusan dengan Amerika Serikat karena Taiwan adalah kepentingan inti China.

Respon Taiwan Terhadap Agresifitas Kebijakan Luar Negri Xi Jinping

Respon Taiwan dimasa kepemimpinan Ma Ying-jeou

Sejak pemerintahan Ma berkuasa pada Mei 2008 hubungan lintas-Selat menjadi relatif lebih stabil dan meningkat dari waktu ke waktu. Meskipun ada peningkatan dalam hubungan lintas-Selat selama masa jabatan Ma tidak memiliki terobosan besar yang dicapai. Sementara pertukaran resmi langsung terbatas antara kementerian kedua belah pihak yang bertanggung jawab atas hubungan lintas-Selat yang terjalin. Xi dan Ma menggelar pertemuan di Singapura pada November 2015 China dan Taiwan tidak dapat bergerak melampaui fase buah menggantung rendah ke tugas yang lebih sensitif sulit untuk terlibat dalam negosiasi politik. Interpretasi mereka tentang status quo dan stabilitas juga berbeda. Bagi China status quo berarti bahwa Taiwan tidak akan mencari kemerdekaan de jure dan mematuhi Konsensus 1992 yang diharapkan China ini merupakan bukan sebuah solusi permanen. Sebaliknya kepemimpinan China melihat tujuan akhir penyatuan China-Taiwan sebagai babak terakhir dari peningkatan kekuatan yang membersihkan diri dari penghinaan di masa lalu.⁴³

Kebijakan Ma dan penyesuaian taktik China selama dekade terakhir telah mendorong lingkungan yang relatif damai dan stabil dalam sumber fundamental konflik dan ketidakstabilan tidak pernah sepenuhnya ditangani dengan baik sebelumnya. China telah secara konsisten mengulangi klaim kedaulatannya atas Taiwan dengan penggunaan kekuatan selalu merupakan cara yang tegas dan terakhir untuk mencegah dan memaksa Taiwan untuk mencapai kesepakatan politik akhirnya. Memang di luar pertukaran ekonomi, sosial, dan budaya, kontak

⁴³ Ling, Y. L. (2009). Pu Yu-Fu, Taiwan's Star of Hope: Ma Ying-Jeou. *American Journal of Chinese Studies*, 16(1), 75-77.

bilateral di bidang keamanan kecuali di bidang keamanan nontradisional seperti anti-pembajakan, kesehatan, dan bantuan kemanusiaan, apalagi pertukaran militer hampir tidak ada.⁴⁴ China waspada dan tidak mau memberi Taiwan ruang internasional yang lebih besar karena takut dianggap menyetujui status Taiwan sebagai sebuah negara Taipei memandang penghalangan China untuk berpartisipasi dalam organisasi internasional sebagai bukti upaya China untuk menyingkirkan Taiwan di komunitas internasional.

Respon Taiwan dimasa Kepemimpinan Tsai Ing-Wen

Tsai setuju dengan Xi bahwa pada tahun 1992 kedua belah pihak di seberang Selat telah bersama-sama mengakui bahwa mereka dapat mengesampingkan perbedaan untuk mencari kesamaan. Tetapi Tsai menolak untuk menjanjikan bahwa *One China Principle* dan mempromosikan Konsensus Taiwan sebagai landasan hubungan lintas-selat. Dalam upaya untuk memindahkan percakapan lintas selat melampaui Konsensus 1992 di mana kedua belah pihak menemui jalan buntu Presiden Tsai mengusulkan *Three News*. status quo sebagai dasar pendekatan lintas selatnya Tsai meminta kedua belah pihak untuk mengakui bahwa ada situasi baru untuk mempertimbangkan pertanyaan baru merujuk pada penilaian China atas pidato pengukuhanannya pada Mei 2016 sebagai tidak lengkap menjawab permintaan one China mereka dan untuk mengembangkan model

⁴⁴ Lee, C. Y. (2018, August). The China–Taiwan Relationship Before and After 19th Congress. In *China's 19th Party Congress: Start Of A New Era* (p. 205). World Scientific.

interaksi baru (新情勢、新問卷、新模式). Pada 19 Mei Tsai mengklarifikasi bahwa situasi baru adalah produk demokrasi Taiwan.⁴⁵

Tsai Ing-wen terpilih menjadi Presiden Tsai seorang anggota DPP mendukung Taiwan yang independen, dan tidak mendukung *one country, two system* Xi. Tsai berusaha untuk mengumumkan kemerdekaan Taiwan secara terbuka dan tidak menggunakan bahasa diplomatik kedua sisi Selat untuk mendefinisikan Taiwan dan China. Dimasa kepemimpinan Tsai Ing-Wen ini dapat ditelusuri kembali ke Lee Tung-hui, Chen Shui-bian dan Tsai Ing-wen stigmatisasi lama dan berulang dari Partai Progresif Demokratik DPP terhadap *one country, two system*. Mereka telah mendukung gagasan bahwa solusi kebijakan seperti itu akan sama dengan memperlakukan Taiwan seperti Hong Kong dan mewakili Hong Kong-isasi di Taiwan. Ini telah menghasilkan teori-teori yang berpengaruh tentang dwarf-ization dan aneksasi dalam masyarakat Taiwan.⁴⁶ Faktor kedua adalah asimetri informasi yang parah dan ketidakcukupan yang ada di seluruh Selat Taiwan. Orang-orang di Taiwan tidak memahami detail dari solusi *one country, two system* yang diusulkan yang memberikan peluang untuk stigmatisasi. Selain itu karena KMT tertinggal dalam kebijakan hubungan lintas Selatnya dan mengikuti DPP dalam menentang *one country, two system* seiring waktu kebanyakan orang di Taiwan menjadi bias terhadap *one country, two system*. Bagi Tsai model yang digunakan untuk memasukkan Hong Kong ke

⁴⁵ Romberg, A. D. (2016). Tsai Ing-wen takes office: A new era in Cross-Strait relations. *China Leadership Monitor*, 50, 1-13.

⁴⁶ Lin, W. C. (2016). Taiwan Enters the Tsai Ing-Wen Era and the Impact On Cross-Strait Relations. *ISPI*, 293, 1-12.

Republik rakyat China tidak dapat diterima sebagai gantinya menyerukan konsensus Taiwan.⁴⁷

Perdamaian dan stabilitas lintas-Selat bergantung pada keseimbangan militer dan kemampuan dalam untuk menyerang atau mempertahankan Taiwan. Berbeda dengan pertumbuhan pesat China dan modernisasi militer selama dua dekade terakhir pertahanan Taiwan tidak bertahan dan dalam banyak aspek benar-benar terhenti terhalang oleh ketidakmampuannya untuk mempertahankan tingkat pembelanjaan pertahanan yang di janjikan 3 persen dari PDB. Kekurangan anggaran pertahanan kontras dengan pengeluaran pertahanan dan pembangunan militer yang tumbuh di daratan yang telah menghasilkan kemampuan militer yang maju yang tidak hanya menimbulkan ancaman yang lebih serius bagi Taiwan dan memiliki implikasi penting bagi keamanan nasional Taiwan tetapi juga membatasi kemampuan Amerika Serikat untuk campur tangan dalam setiap potensi konflik. Berkurangnya kebebasan bertindak Taiwan yang dapat merusak kedaulatan dan otonominya secara serius membuka jalan bagi China untuk mencapai tujuan utamanya penyatuan dengan caranya sendiri.⁴⁸

Rasionalitas Kebijakan Luar Negri China Terhadap Taiwan

Bagi China apapun yang terjadi Taiwan merupakan wilayah yang akan dipersatukan kembali dengannya dan juga berada di garis depan konfrontasi China dengan Amerika Serikat. Dengan demikian bahkan setelah berakhirnya Perang

⁴⁷ Cheng, I. (2021). Productivity, cohesion and dignity: The contestation of migration policy under the first Tsai Ing-wen administration. In *Taiwan During the First Administration of Tsai Ing-wen* (pp. 254-282). Routledge.

⁴⁸ Cabestan, J. P. (2017). Beijing's policy towards President Tsai Ying-wen and the future of cross-Strait relations. *Whitehead J. Dipl. & Int'l Rel.*, 18, 55.

Dingin masalah Taiwan tetap menjadi salah satu sumber potensial konflik antara China dan Amerika Serikat dan dalam hal ini isu mengenai Taiwan juga penting bagi stabilitas seluruh kawasan.⁴⁹ China telah mampu mengatasi konsentrasi tunggal pada Taiwan dan memajukan kehadiran dan aktivitasnya dalam urusan maritim. Karena proses ini kadang-kadang melibatkan China yang mengikuti garis yang sangat keras proses ini memiliki pengaruh pada stabilitas kawasan. Ada kemungkinan bahwa jika Taiwan mencurahkan lebih sedikit upayanya untuk membela diri tindakan China akan menjadi lebih ekspansionis. Perhatian Taiwan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan diri dapat mempengaruhi stabilitas kawasan secara keseluruhan. Selanjutnya, urusan maritim juga menjadi penting karena Taiwan terletak pada perhubungan saluran navigasi internasional yang menghubungkan Laut Cina Timur, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. Karena konfrontasi geografis di Asia Timur mengambil dimensi baru kepentingan strategis Taiwan yang akan sangat meningkat.⁵⁰

Taiwan dan Wacana Nasional Identitas

Pemerintah China jelas khawatir bahwa jika kebanyakan orang di Taiwan mengidentifikasi diri sebagai orang Taiwan dan lebih memilih kemerdekaan hal ini dapat secara serius merusak prospek penyatuan di masa depan. Sejak kembalinya Hong Kong dan Makau ke tanah air penyatuan terakhir Taiwan dengan China menjadi semakin penting bagi peremajaan China. Ini tidak berarti Taiwan adalah wilayah terakhir yang hilang sehingga mengakhiri penghinaan

⁴⁹ Bartlett, B. (1997). Hong Kong & Taiwan: how China sees things. *Commonweal*, 124(8), 17-19.

⁵⁰ Kaplan, R. D. (2010). The geography of Chinese power: how far can Beijing reach on land and at sea?. *Foreign Affairs*, 22-41.

nasional China yang berusia seabad oleh kekuatan asing.⁵¹ Sebaliknya dari perspektif Beijing masalah pemulihan wilayah telah diselesaikan sejak akhir Perang Dunia II. Dengan tidak mengubah fakta bahwa baik China maupun Taiwan adalah milik satu China. Bagi kedua sisi Selat kembali ke persatuan bukanlah rekreasi kedaulatan atau wilayah tetapi mengakhiri antagonisme politik.⁵²

Rasa identitas nasional sebagai bagian penting dari pembangunan bangsa, karena menanamkan loyalitas dan semangat partisipatif dalam warga negara yang heterogen secara etnoreligius dan rasa koherensi kolektif dan afiliasi internasional atau arah di negara-bangsa. Pada saat yang sama, dalam kasus-kasus ekstrem hal itu dapat mendorong ambisi internasional yang buta dan pada akhirnya merusak diri sendiri. Rasa identitas Tionghoa terhadap Taiwan dan wilayah pinggirannya lainnya cukup stabil bahkan mencakup era revolusioner Nasionalis dan komunis: pemahamannya adalah bahwa semua wilayah ini harus berasimilasi ke tanah air sesegera dan semaksimal mungkin membuat kelonggaran minimal untuk perbedaan etnolinguistik.⁵³ Semua penyesuaian identitas ini ditumpangkan dari atas ke bawah pada populasi yang relatif pasif.⁵⁴

Upaya China untuk merekonstruksi identitas nasional China dalam kaitannya dengan Taiwan. Secara teoritis identitas nasional Tionghoa bersifat asli

⁵¹ Hughes, C. R. (2013). NEGOTIATING NATIONAL IDENTITY IN TAIWAN. *Taiwan's Democracy: Economic and political challenges*, 6, 51.

⁵² Berman, S.L., You, Y., Schwartz, S.J., Teo, G., & Mochizuki, K. (2011). Identity Exploration, Commitment, and Distress: A Cross National Investigation in China, Taiwan, Japan, and the United States. *Child & Youth Care Forum*, 40, 65-75.

⁵³ Lin, S. S. (2021). Analyzing the relationship between identity and democratization in Taiwan and Hong Kong in the shadow of China. *Democratization, National Identity and Foreign Policy in Asia-L.: Routledge*, 114-134.

⁵⁴ Allan, B. B., Vucetic, S., & Hopf, T. (2018). The distribution of identity and the future of international order: China's hegemonic prospects. *International Organization*, 72(4), 839-869.

dan rekonstruktif. Konsep kuno Kerajaan Tengah terus diperkaya berkat ekspansi politik dan asimilasi budaya sepanjang sejarah. Dari tahun 1949 hingga 1979 di tengah konfrontasi politik dan ketegangan militer orang-orang China dididik untuk membebaskan orang-orang yang sengsara di Taiwan dan membawa penyatuan terhadap Taiwan dan membawanya kembali ke tanah airnya. Sejak 1979 pengalaman pembangunan Taiwan dan peningkatan pertukaran sipil lintas-Selat telah memperluas imajinasi penduduk China tentang modernisasi dan meningkatkan pemahaman mereka tentang identitas nasional. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa rekonstruksi identitas nasional China yang terbentang di Selat Taiwan tidak hanya bergantung pada modernisasi dan integrasi ekonomi, pertukaran dan asimilasi budaya timbal balik, dan interpretasi ulang sejarah China kontemporer dan hubungan politik antara kedua entitas sebelum upaya penyatuan damai China-Taiwan.⁵⁵

Identitas nasional merupakan sesuatu yang dapat dikonstruksi dan bersifat kompleks dan dinamis. Hal ini juga terjadi dengan identitas nasional China. Identitasnya saat ini sedikit bergeser karena pembuat kebijakan di bawah kepemimpinan presiden Xi Jinping, Xi Jinping dikukuhkan sebagai presiden China pada 14 Maret 2014 setelah sebelumnya mengangkat Hu Jintao sebagai Sekjen Partai dan Ketua Komisi Militer Pusat pada November 2012. Seperti diketahui para pemimpin negara yang dianggap mampu membangun mewakili kepentingan masyarakat dan negara secara keseluruhan. Perkembangan identitas nasional China dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kekuatan regional dan

⁵⁵ Lin, G., & Wu, W. (2017). Chinese national identity under reconstruction. *Taiwan and China: Fitful Embrace*, 75-92.

keberadaan negara-negara seperti Amerika Serikat dan Jepang serta pertumbuhan ekonomi China itu sendiri. Presiden sebagai pemimpin negara kemudian juga memiliki peran dalam menentukan jati diri bangsa. Oleh karena itu penyatuan antara China dan Taiwan merupakan misi penting untuk Xi Jinping sebagai warisan politik dari para pemimpin terdahulunya melanjutkan identitas yang ada dan diimplementasikan dalam politik luar negerinya fokus pada identitas nasional di Era Xi Jinping sebagai motif agresivitas China terkait isu Taiwan.⁵⁶

Rasionalitas Xi Jinping Terhadap Isu penyatuan Taiwan

Pengalaman-pengalamanya sebagai rakyat China dan memiliki rasa Nasionalis yang sangat luar biasa kepada negaranya ia memulai memiliki keinginan membangun China menjadi lebih baik.⁵⁷ Program Kebijakan Luar Negeri Xi Jinping bersifat neokonservatif penerapan konsep klasik Stalinis dicapai melalui alat kontrol sosial modern dan kepemimpinannya juga berusaha menyesuaikan dengan pemecahan masalah yang sedang dihadapi oleh China. pemerintahan Xi telah menyaksikan keterlibatan China yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak masa Mao Zedong di arena global dan asumsinya akan kebijakan luar negeri yang lebih tegas.⁵⁸ Kebijakan Xi adalah respons terhadap kepercayaan yang berkembang di antara para pembuat keputusan di Beijing bahwa apa yang disebut periode peluang strategis di mana China dapat berkembang tanpa melakukan konfrontasi. Kebijakan Beijing yang lebih tegas

⁵⁶ Rahmadini, A., & Hennida, C. (2021). National Identity Analysis and Foreign Policy China Aggressive Stance in South China Sea under Xi Jinping.

⁵⁷ Tiffert, G. (2019). 30 years after Tiananmen: Memory in the era of Xi Jinping. *Journal of Democracy*, 30(2), 38-49.

⁵⁸ Bogusz, M., & Jakóbowski, J. (2020). OSW Report| The Chinese Communist Party and its state. Xi Jinping's conservative turn

juga merupakan metode untuk mengkonsolidasikan masyarakat di sekitar Partai untuk memainkan kartu nasionalisme dan untuk pemusatan kekuasaan lebih lanjut di tangan Xi Jinping.⁵⁹

Pengaruh Kebijakan China Terhadap Stabilitas Hubungan China Taiwan

Dukungan Amerika Serikat terhadap Taiwan

Upaya Amerika Serikat dalam mencegah China untuk melakukan penyatuan Taiwan ke China dengan kekerasan Amerika Serikat mengeluarkan sebuah kebijakan *Strategic Ambiguity* dibawah *Taiwan Relations Act* (TRA) pada tahun 1979. TRA memungkinkan Amerika Serikat untuk memberikan pengakuan secara de facto terhadap Taiwan bukan pengakuan de jure.⁶⁰ *Strategic Ambiguity* merupakan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap China dan Taiwan kebijakan tersebut memiliki pola hubungan antara negara yang bersifat ambigu. Pada satu sisi Amerika Serikat tengah membangun hubungan baik dengan China hal ini didukung dengan adanya penerimaan prinsip Satu Cina oleh Amerika Serikat. Akan tetapi di sisi lain Amerika Serikat tetap mempertahankan hubungan baik dengan Taiwan. Hal ini dibuktikan dengan adanya bantuan politik, militer, serta enjuran persenjataan sebagai bentuk kepentingan Amerika Serikat dalam menjadikan Taiwan sebagai mitranya.⁶¹

⁵⁹ John Ruwutch, Timeline-The Rise of Chenies leaders Xi Jinping, daring < <https://www.reuters.com/article/us-china-parliament-xi-timeline-idUSKCN1GS0ZA> > diakses pada 01 juni 2022, 01:54 WITA.

⁶⁰ Tucker, N.B., & Friedman, E.J. (2009). Strait Talk: United States-Taiwan Relations and the Crisis with China (review).

⁶¹ Eryan, R. (2013). The Arms Trade Treaty: U.S. Arms Sales to Taiwan and U.S.-China Relations.

Keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik China dan Taiwan menimbulkan keseimbangan kekuasaan di kawasan Asia Timur. Amerika Serikat merupakan negara yang berkuasa pasca Perang Dingin berupaya mempertahankan posisinya di kawasan tersebut, salah satunya melalui upaya balancing dengan Taiwan dari kekuatan China namun di satu sisi muncul China sebagai kekuatan baru di dalam dinamika sistem internasional yang akan menghambat kekuatan Amerika Serikat di kawasan Asia Timur. Munculnya dukungan Amerika Serikat terhadap Taiwan dalam bentuk dukungan militer dan politik sebagai penyeimbang dari kekuatan China di Asia Timur China memiliki peran besar dalam perkembangan ekonomi dan politik sehingga mengancam kekuatan Amerika Serikat di kawasan tersebut.⁶² Selain hal tersebut Amerika juga menganggap Taiwan sebagai mitra dalam perdagangan senjata sekaligus negara yang memerlukan dukungan internasional untuk mengembangkan demokratisasi dalam negaranya sehingga sikap proaktif dari Amerika Serikat sebagai negara demokratisasi akan membantu perluasan dukungan terhadap Taiwan.

Dinamika Hubungan China-Taiwan dibawah Kepemimpinan Tsai Ing-Wen

Kemenangan Tsai Ing-wen dalam pemilihan sebagai presiden Taiwan bersama dengan pencapaian mayoritas legislatif secara bersamaan untuk Partai Progresif Demokratik (DPP) menandakan sejumlah ketidakpastian penting di masa depan arah hubungan lintas selat yang patut untuk diperiksa lebih dekat. Secara politis hasil pemilu menandakan peralihan kekuasaan dari pemerintahan presidensial dan parlemen yang dikendalikan oleh Kuomintang (KTM) era baru di

⁶² (2019). New US support for Taiwan complicates China relations. *Emerald Expert Briefings*.

mana eksekutif dan legislatif sekarang dipimpin oleh DPP dengan partai tersebut memperoleh kendali parlemen Taiwan dari KMT untuk pertama kalinya. Dalam nomenklatur berkode warna dari spektrum politik domestik Taiwan yang semarak biru telah digantikan oleh hijau.⁶³

Polemik kepemimpinan DPP sebagai presiden terpilih Taiwan tentu nya setiap kebijakan-kebijakan bahkan agenda poliknya jauh bertolak belakang dengan China. Dengan adanya situasi seperti ini mengakibatkan hubungan China-Taiwan memburuk karena perbedaan dalam menjalankan aspek-aspek politik. Tentu saja DPP seperti kebanyakan partai politik mencerminkan aspek pandangan tentang isu-isu utama. Partai tersebut mewakili di bawah payung tunggal serangkaian keyakinan dari separatis hijau tua yang bersemangat yang menganjurkan kemerdekaan penuh sebagai Negara Taiwan untuk lebih fleksibel pragmatis berwarna lebih ringan yang biasanya bersedia untuk terlibat dengan Beijing di bawah pengaturan konstitusional saat ini, sementara masih penuh semangat menjaga kedaulatan. Tsai sendiri tidak asing dengan kontroversi tentang masalah kemerdekaan. Sebelum dia kalah sebagai kandidat presiden DPP pada tahun 2012 pernyataan kebijakan Tsai tentang hubungan lintas selat dan dia mengusulkan Konsensus Taiwan sebagai pendahulu untuk dialog dengan China menyebabkan komentar kritis di Beijing dan Washington. Selama kampanye itu dia bahkan menyangkal keberadaan formula Konsensus 1992. Namun sejak terpilih untuk kedua kalinya sebagai calon presiden dari partainya dia telah berusaha untuk berjalan di tengah jalan relatif moderasi dalam konteks DPP

⁶³ Schubert, G., & Lee, C. Y. Taiwan During the First Administration of Tsai Ing-wen.

mendukung apa yang dia definisikan sebagai status quo yang tidak hanya didukung oleh konstitusi China.⁶⁴

Proyeksi Masa Depan Kebijakan China Terhadap Taiwan dimasa Kepemimpinan Xi Jinping

Kebijakan luar negeri China di bawah Xi Jinping telah menjadi lebih tegas. Dalam beberapa tahun terakhir China telah menunjukkan kecenderungan untuk memperluas definisi kepentingan nasionalnya khususnya yang disebut kepentingan nasional inti istilah ini hanya diperuntukkan bagi Taiwan. Mengemukakan definisi kepentingan nasional inti yang lebih luas dan umum China harus melindungi kepentingan kedaulatan, keamanan, dan pembangunan China isu politik luar negeri yang masuk dalam kategori core national interest selalu menjadi hal yang sensitif. Namun menjadi lebih jelas di bawah pemerintahan Xi Jinping bahwa Taiwan dan Laut China Selatan memang menjadi kepentingan utama China. Xi Jinping menyatakan Sejak Kongres Partai ke-18 *'kami secara khusus mengintai posisi kami di Taiwan, Laut China Selatan, dan isu-isu lain mengenai kepentingan inti utama China'*.⁶⁵ Ini adalah yang paling penting pernyataan eksplisit sejauh ini bahwa Laut China Selatan serta kepentingan dan hak maritim terkait adalah kepentingan nasional inti China. Segera setelah suatu masalah didefinisikan sebagai kepentingan nasional inti hal itu sering menyiratkan bahwa pemerintah China memiliki sedikit ruang untuk

⁶⁴ Nugroho, R. A. (2022). Strategi Peningkatan Keamanan Taiwan Dalam Menghadapi China. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO*, 2(1), 1-11.

⁶⁵ Wu, S. S. The Perspectives of Cross-Straits Relations: An Analytical Framework and its Implications.

berkompromi dan tindakan yang lebih kuat dapat dibenarkan jika kepentingan inti dilanggar. Itu bisa menjelaskan dengan baik bahwa sikap China yang lebih kuat terhadap Taiwan mencerminkan China di bawah Xi Jinping mengejar penyatuan China-Taiwan dengan sesegera mungkin.⁶⁶

Definisi kepentingan nasional China yang lebih luas dan eksplisit selama era Xi Jinping juga terkait dengan aspek lain dari cara berpikir barunya tentang diplomasi. Itulah yang disebut pemikiran garis bawah. Xi pertama kali menyebutkan gagasan ini pada pertemuan penting di awal 2013. Kemudian dia berulang kali menyebutkannya belasan kali dalam berbagai pidato dan artikel publik. Menurut Xi Jinping pembuat kebijakan *'harus pandai menggunakan pemikiran bottom-line, segala sesuatu mulai dari persiapan yang buruk, dan berusaha untuk hasil terbaik, sehingga siap, gagal panik, pegang inisiatif dengan kuat'*.⁶⁷ Ketika datang untuk melamar konsep ini untuk kepentingan nasional inti yang berarti China harus menarik beberapa garis merah yang harus dilintasi dalam keadaan apa pun. Seperti yang dikatakan sejak Kongres Partai ke-18 *'Kami telah menarik garis yang jelas tentang apa yang tidak dapat diterima, dan bertindak tegas untuk membela kepentingan inti kami serta hak-hak yang sah'*.⁶⁸

Dengan kata lain pembangunan damai China bukan tanpa syarat dan bersifat kontingen atas apa yang disiratkan oleh perilaku negara lain bahwa ada kemungkinan kebangkitan yang tidak damai jika negara lain mengejar kebijakan tidak damai terhadap China. Ini juga dapat dilihat sebagai respons terhadap

⁶⁶ Overholt, W. H. (2012). Reassessing China: Awaiting Xi Jinping. *The Washington Quarterly*, 35(2), 121-137.

⁶⁷ Fewsmith, J. (2013). Xi Jinping's fast start. *China Leadership Monitor*, 41(3), 4.

⁶⁸ Mattlin, M. (2004). Same content, different wrapping: Cross-Strait policy under DPP rule. *China Perspectives*, 2004(56).

persepsi yang dipegang secara luas bahwa sikap kebijakan luar negeri China di bawah Xi menjadi lebih tegas dan kurang damai karena tindakan China yang lebih keras bisa menjadi respons terhadap negara lain yang mengganggu China atas kepentingan. Dari logika pemikiran seperti itulah Xi menyatakan dalam berbagai kesempatan bahwa meskipun China akan mempertahankan perkembangannya yang damai ia tidak akan pernah melepaskan hak dan kepentingannya yang sah atau membiarkan kepentingan inti China dirusak. menurut Xi ini merupakan hal minimum yang harus dijunjung tinggi oleh China sebagai negara besar pemikiran mendasar tentang kedaulatan dan integritas teritorial ini juga dapat menjelaskan alasan di balik peningkatan ketegasannya dalam kebijakan luar negeri China yang kuat sejak ia berkuasa.⁶⁹

Pemikiran Xi Jinping juga tercermin dalam penanganannya terhadap masalah Taiwan sejak ia berkuasa. Tetapi ketika Taiwan gagal untuk mengakui Konsensus 1992 dan *One China Principle* Xi menunjukkan sedikit fleksibilitas yang memperingatkan Taiwan bahwa merusak fondasi politik hubungan lintas-selat dapat menyebabkan masa depan hubungan China dan Taiwan berada pada penyatuan secara paksa oleh China. Mengingat Xi Jinping bisa kehilangan kesabaran atas masalah Taiwan dan memiliki niat untuk menyelesaikan masalah tersebut saat dia berkuasa. Pada Kongres Partai ke-19 Xi Jinping '*Setiap aktivitas separatis pasti akan bertemu dengan oposisi tegas dari orang-orang China. Kami memiliki tekad, kepercayaan diri, dan kemampuan untuk mengalahkan upaya separatis untuk kemerdekaan Taiwan dalam bentuk apa pun. Kami tidak akan*

⁶⁹ Mattlin, M. (2004). Same content, different wrapping: Cross-Strait policy under DPP rule. *China Perspectives*, 2004(56).

pernah mengizinkan siapa pun, organisasi apa pun, atau partai politik mana pun, kapan pun atau dalam bentuk apa pun, untuk memisahkan bagian mana pun dari wilayah China'.⁷⁰

Mencerminkana bahwa proyeksi masa depan kebijakan China terhadap Taiwan dimasa kepemimpinan Xi Jinping akan terus mengalami peningkatan ketengan hubungan antara keduanya. China akan terus menerapkan kebijakan yang bersifat tegas akan Taiwan ini merupakan manifestasi warisan politik Xi Jinping dari pendahulunya bahwa Taiwan merupakan kepentingan inti China. Sikap Taiwan yang menolak akan kebijakan-kebijakan China sebagai pondasi politik, setiap gerakan kemerdekaan, serta gangguan dari pihak eksternal merupakan salah satu pengaruh akan setiap peningkatan ketengan dimasa depan. Mengingat bahwa China tidak segan untuk menggunakan instrument militernya dalam mengakusisi Taiwan secara paksa jika ini merupakan tindakan pilihan terakhir yang harus digunakan China untuk membawa Taiwan kembali.

Kesimpulan

Isu mengenai penyatuan Taiwan berkembang dari waktu kewaktu serta penyatuan bukan hal bisa dikesampingkan China mengingat pentingnya taiwan bagi china. Arah dari kebijakan luar negri China terhadap Taiwan meliputi tiga faktor objektif menjelaskan kekakuan dan ketegasan ini. Pertama peningkatan pengaruh identitas nasional yang berkembang antara China dan Taiwan. Kedua kebangkitan China setelah mendapatkan kembali status kekuatan besar dan

⁷⁰ Lin, W. C. (2016). Taiwan Enters the Tsai Ing-Wen Era and the Impact On Cross-Strait Relations. *ISPI*, 293, 1-12.

meningkatkan dominasi Asia Timur telah meyakinkan bahwa China dapat menyelesaikan masalah Taiwan dengan caranya sendiri. Ketiga ketegasan kebijakan luar negeri China telah meningkatkan kepentingan intinya termasuk penyatuan dengan Taiwan ke status pada dasarnya tidak dapat dinegosiasikan. Dengan kata lain asimetri hubungan Lintas-Selat yang berkembang telah menyebabkan China beralih dari strategi yang terutama ditujukan untuk mencegah kemerdekaan formal Taiwan atau yang sebut sebagai perkembangan damai hubungan lintas-Selat ke strategi yang bertujuan mempercepat proses penyatuan.

Xi Jinping sebagai Presiden China saat ini harus pencapaian misi bersejarah untuk memperkuat warisan politiknya. Dalam banyak pidato terutama pada 2019 Xi terus menekankan peran penting China untuk membawa Taiwan kembali ke tanah airnya dan selanjutnya mengaitkan Penyatuan Taiwan dengan tujuan menyeluruhnya yaitu peremajaan nasional. Penyatuan Taiwan secara historis merupakan aspirasi bersama di antara semua orang China di seluruh struktur masyarakat China terlepas dari warga negara biasa atau pejabat pemerintah semuanya sangat mendukung gagasan menyatukan kembali Taiwan ke China yang merupakan bagian dari identitas nasional mereka yang terpisah. China yang melihat penyatuan Taiwan sebagai misi inti mengingat bahwa setiap pemimpin PKC telah mencita-citakannya sepanjang sejarah China. Xi Jinping dengan penyatuan Taiwan menjadi sumber yang sangat kuat dan layak untuk mengkonfirmasi legitimasi sebagai Presiden China. Selama Kongres Partai ke-19 pada tahun 2017 PKC di bawah pemerintahan Xi membuat langkah awal pertama dengan menetapkan untuk mencapai penyatuan Taiwan sebelum tahun 2049. Jika

Xi berhasil mencapai tujuan ini itu akan menunjukkan pesan yang kuat kepada China yang menunjukkan bahwa Xi sebagai pemimpin PKC dapat dipercaya untuk memenuhi janjinya.

Namun berangkat dari pengembangan damai strategi hubungan lintas selat pemimpin pendalunya Xi telah dengan jelas menegaskan kesediaannya untuk tidak meneruskan masalah Taiwan ke generasi berikutnya. China pada akhirnya akan menggunakan kekuatan militer seperti yang dilakukan seperti yang ditunjukkan ini ia tidak menunggu untuk memberikan serangkaian kebijakan luar negeri yang tegas kepada Taiwan. dan dengan menunda penyatuan formal selama tiga puluh tiga tahun lagi Xi Jinping dapat mempertahankan pilihannya tetap terbuka dan tanpa secara resmi mengakuinya meneruskan masalah Taiwan kepada generasi pemimpin China berikutnya.

Alasan optimisme ini adalah bahwa penyatuan adalah tujuan yang sama-sama dimiliki oleh China dan Taiwan dan sebenarnya ini adalah kesamaan terbesar di antara keduanya. China sebagai negara bersikap rasional dan bersedia bekerja sekeras mungkin untuk mempertahankan nilai kolektif dalam kepentingannya mengenai isu Taiwan yang merupakan bagian dari wilayah dan identitas nasional yang terpisah. Terlihat melalui Kebijakan luar negeri China terhadap Taiwan menegaskan kembali asumsi ini. Mengingat penetapan garis waktu 2049 untuk penyatuan China-Taiwan kebijakan luar negeri yang terus ditegaskan oleh China saat ini dan tidak akan terlalu angkuh untuk sepenuhnya mengorbankan rasionalitas dan memulai penyatuan dengan menggunakan

instrument militer. China tidak pernah mengesampingkan menggunakan kekuatan dalam isu Taiwan penyatuan sangat penting bagi China.

Stabilitas hubungan lintas selat masih relatif dinamis dan kompleks mengandung tiga tingkat faktor interaktif. Ini termasuk faktor di balik tujuan pribadi China dan Taiwan sendiri, faktor interaktif lintas selat, dan faktor internasional khususnya lanskap strategis Asia Timur serta dominasi Amerika Serikat. Faktor-faktor ini saling terkait dan sangat interaktif. Jika salah satu dari mereka mengalami masalah itu akan mempengaruhi secara keseluruhan terhadap stabilitas hubungan China dan Taiwan.

Melihat ke masa depan tidak ada jaminan bahwa hubungan China-Taiwan akan beralih ke yang lebih baik dan stabil. Ketidak stabilan hubungan China-Taiwan disebabkan jika Taiwan terus tidak mengakui Konsensus 1992 dan *One China Principle* sebagai dasar landasan politik dan pemahan bahwa Taiwan milik China. Taiwan di masa depan prospek hubungan China-Taiwan akan mengalami ketidak stabilan dan mendorong kepada situasi yang dapat jauh lebih buruk jika Taiwan terus mendeklarasikan setiap gerakan kemerdekaan. Xi Jinping telah berpegang pada ketegasan dalam hubungan China-Taiwan sebagai tujuan yang konsisten dengan penyatuan. Dia tidak hanya berpegang pada kejelasan dalam strategi dan prinsipnya tetapi juga telah memberlakukan serangkaian kebijakan yang dirancang untuk mencapai tujuan penyatuan China-Taiwan. Dilihat dari beberapa tahun terakhir pemerintahannya Xi Jinping akan terus berjuang untuk tujuan ini mengenai penyatuan dalam melihat masa depan hubungan China-Taiwan.

Sikap ketegasan China dalam membimbing hubungan China-Taiwan jika ada interaksi di semua tingkatan untuk meningkatkan saling pengertian mengenai pentingnya penyatuan. Selain itu jika Taiwan dan China dapat menempatkan diri pada posisi masing-masing masing-masing dapat menumbuhkan rasa penghargaan atas posisi satu sama lain dan mungkin dilema sejarah ini dapat diselesaikan dalam generasi ini. Taiwan berdiri dengan mempertahankan status quo di Selat Taiwan hubungan lintas selat itu kompleks dan terus berubah selama beberapa tahun terakhir dan dilema mengenai sejarah mengenai Taiwan, China ingin menyelesaikan dalam waktu yang relative yakni di generasi kepemimpinan Xi Jinping.

Daftar Pustaka

Jurnal dan Artikel:

Sherridan, I. (2018). Hubungan China dan Taiwan dalam Hal Status Kedaulatan Negara Taiwan.

Thompson, D. (2020). The Rise of Xi Jinping and China's New Era: Implications for the United States and Taiwan. *Issues & Studies*, 56(01), 2040004.

Dewi, I. F., & Dewi, K. U. (2019). Strategi Pemerintahan Xi Jinping terhadap Taiwan dalam Mengamankan Kedaulatan Tiongkok. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(2), 161-168.

Al Syahrin, M. N. (2018). Kompleksitas Keamanan Kawasan dan Tantangan Kerja Sama Keamanan Asia Timur. *Nation State: Journal of International Studies*, 1(1), 24-44.

Prasetya, D. M. (2012). Strategi Defensif China dalam Merespon Kebijakan Amerika Serikat atas Taiwan. *MEJ (Mathematics Education Journal)*, 2(1).

Sarkar, M. G. (2020). Xi Jinping's PLA and China's regional security ambitions. In *Chinese Politics and Foreign Policy under Xi Jinping* (pp. 276-306). Routledge.

Bush, R. C. (2017). What Xi Jinping said about Taiwan at the 19th Party Congress. *Brookings Institution*, 19.

'A New Level of Aggressiveness: Recent Changes in Xi Jinping's Formulation of Taiwan Policy,' Georgetown

- Sarkar, M. G. (2020). Xi Jinping's PLA and China's regional security ambitions. In *Chinese Politics and Foreign Policy under Xi Jinping* (pp. 276-306). Routledge.
- Dewi, I. F., & Dewi, K. U. (2019). Strategi Pemerintahan Xi Jinping terhadap Taiwan dalam Mengamankan Kedaulatan Tiongkok. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(2), 161-168.
- Huang, J. (2017). 13. Xi Jinping's Taiwan Policy: Boxing Taiwan In with the One-China Framework. In *Taiwan and China* (pp. 239-248). University of California Press.
- Lampton, D. M. (2015). Xi Jinping and the National Security Commission: policy coordination and political power. *Journal of Contemporary China*, 24(95), 759-777.
- Friedman, E. (2007). China's Changing Taiwan Policy. *American Journal of Chinese Studies*, 14(2), 119-134. <http://www.jstor.org/stable/44288853>
- Bo, Z. (2002). Guest Editor's Introduction. *Chinese Law & Government*, 35, 17 - 3.
- Zhao, S. (2006). Conflict prevention across the Taiwan Strait and the making of China's anti-secession law. *Asian Perspective*, 30(1), 79-94.
- Tamara, T. D. (2020). Politik Luar Negeri Taiwan Terhadap China Di Bawah Kepemimpinan Ma Ying Jeou (2008-2012). *Indonesian Journal of Global Discourse*, 2(1), 14-26.

- Weissmann, M. (2015). Chinese Foreign Policy in a Global Perspective: A Responsible Reformer" Striving For Achievement". *Journal of China and International relations*, 3(1).
- Blackwill, R. D., & Campbell, K. M. (2016). *Xi Jinping on the global stage: Chinese foreign policy under a powerful but exposed leader*. Council on Foreign Relations Press.
- Rahmadini, A., & Hennida, C. (2021). National Identity Analysis and Foreign Policy China Aggressive Stance in South China Sea under Xi Jinping.
- Huang, J. (2017). 13. Xi Jinping's Taiwan Policy: Boxing Taiwan In with the One-China Framework. In *Taiwan and China* (pp. 239-248). University of California Press.
- Ahzani, W. F. (2021). Upaya Pemerintahan Tsai Ing-Wen Melawan Tekanan One-China Principle pada Era Xi Jinping. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(4), 552-564.
- Dewi, I. F., & Dewi, K. U. (2019). Strategi Pemerintahan Xi Jinping terhadap Taiwan dalam Mengamankan Kedaulatan Tiongkok. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(2), 161-168.
- Dr. Hsiao-chuan Liao, An Interpretation of Xi's Taiwan Policy—and Taiwan's Response.
- Lin, W. C. (2016). Taiwan Enters the Tsai Ing-Wen Era and the Impact On Cross-Strait Relations. *ISPI*, 293, 1-12.

- Yon, W. (2015). "One Country, Two Systems"-Comrade DENG Xiao-ping's Great Conception and its Practical Significance——In memory of his 110th Birthday.
- Heo, J. C. (2021). Twenty Years of One Country Two Systems in China: Evaluation and Future Prospects. *KIEP Research Paper, Word Economy Brief*, 21-20.
- Huang, J. (2017). Xi Jinping's Taiwan Policy: Boxing Taiwan In with the One-China Framework. In L. Dittmer (Ed.), *Taiwan and China: Fitful Embrace* (1st ed., pp. 239–248). University of California Press. <http://www.jstor.org/stable/10.1525/j.ctt1w76wpm.16>
- Chen, C. J. J., & Zheng, V. (2022). Changing attitudes toward China in Taiwan and Hong Kong in the Xi Jinping era. *Journal of Contemporary China*, 31(134), 250-266.
- Moll, K. L. (1963). AT Mahan, American Historian. *Military Affairs*, 131-140.
- Fravel, M. T. (2008). China's search for military power. *Washington Quarterly*, 31(3), 125-141.
- Cole, B. D. (2014). The history of the twenty-first-century Chinese navy. *Naval War College Review*, 67(3), 43-62.
- Fravel, M. T. (2015). China's New Military Strategy: 'Winning Informationized Local Wars'. *China Brief*, 15(13), 3-7.
- Kazianis, H. J. (2015). Is China's „Carrier-Killer” Really a Threat to the US Navy. *The National Interest*, 2.

- Larus, E. F. (2015). Technological Change and China's Naval Modernization: Security Implications for Taiwan. In *Cross-Taiwan Strait Relations in an Era of Technological Change* (pp. 41-60). Palgrave Macmillan, London.
- Ling, Y. L. (2009). Pu Yu-Fu, Taiwan's Star of Hope: Ma Ying-Jeou. *American Journal of Chinese Studies*, 16(1), 75-77.
- Lee, C. Y. (2018, August). The China–Taiwan Relationship Before and After 19th Congress. In *China's 19th Party Congress: Start Of A New Era* (p. 205). World Scientific.
- Romberg, A. D. (2016). Tsai Ing-wen takes office: A new era in Cross-Strait relations. *China Leadership Monitor*, 50, 1-13.
- Lin, W. C. (2016). Taiwan Enters the Tsai Ing-Wen Era and the Impact On Cross-Strait Relations. *ISPI*, 293, 1-12.
- Cheng, I. (2021). Productivity, cohesion and dignity: The contestation of migration policy under the first Tsai Ing-wen administration. In *Taiwan During the First Administration of Tsai Ing-wen* (pp. 254-282). Routledge.
- Cabestan, J. P. (2017). Beijing's policy towards President Tsai Ying-wen and the future of cross-Strait relations. *Whitehead J. Dipl. & Int'l Rel.*, 18, 55.
- Bartlett, B. (1997). Hong Kong & Taiwan: how China sees things. *Commonweal*, 124(8), 17-19.
- Kaplan, R. D. (2010). The geography of Chinese power: how far can Beijing reach on land and at sea?. *Foreign Affairs*, 22-41.

- Nathan, A. J. (1996). China's Goals In The Taiwan Strait. *The China Journal*, (36), 87-93.
- Hughes, C. R. (2013). NEGOTIATING NATIONAL IDENTITY IN TAIWAN. *Taiwan's Democracy: Economic and political challenges*, 6, 51.
- Berman, S.L., You, Y., Schwartz, S.J., Teo, G., & Mochizuki, K. (2011). Identity Exploration, Commitment, and Distress: A Cross National Investigation in China, Taiwan, Japan, and the United States. *Child & Youth Care Forum*, 40, 65-75.
- Lin, S. S. (2021). Analyzing the relationship between identity and democratization in Taiwan and Hong Kong in the shadow of China. *Democratization, National Identity and Foreign Policy in Asia-L.: Routledge*, 114-134.
- Allan, B. B., Vucetic, S., & Hopf, T. (2018). The distribution of identity and the future of international order: China's hegemonic prospects. *International Organization*, 72(4), 839-869.
- Lin, G., & Wu, W. (2017). Chinese national identity under reconstruction. *Taiwan and China: Fitful Embrace*, 75-92.
- Rahmadini, A., & Hennida, C. (2021). National Identity Analysis and Foreign Policy China Aggressive Stance in South China Sea under Xi Jinping.
- Tiffert, G. (2019). 30 years after Tiananmen: Memory in the era of Xi Jinping. *Journal of Democracy*, 30(2), 38-49.
- Bogusz, M., & Jakóbowski, J. (2020). OSW Report| The Chinese Communist Party and its state. Xi Jinping's conservative turn

Tucker, N.B., & Friedman, E.J. (2009). Strait Talk: United States-Taiwan Relations and the Crisis with China (review).

Eryan, R. (2013). The Arms Trade Treaty: U.S. Arms Sales to Taiwan and U.S.-China Relations.

(2019). New US support for Taiwan complicates China relations. *Emerald Expert Briefings*.

Schubert, G., & Lee, C. Y. Taiwan During the First Administration of Tsai Ing-wen.

Nugroho, R. A. (2022). Strategi Peningkatan Keamanan Taiwan Dalam Menghadapi China. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO*, 2(1), 1-11.

Wu, S. S. The Perspectives of Cross-Straits Relations: An Analytical Framework and its Implications.

Mattlin, M. (2004). Same content, different wrapping: Cross-Strait policy under DPP rule. *China Perspectives*, 2004(56).

Lin, W. C. (2016). Taiwan Enters the Tsai Ing-Wen Era and the Impact On Cross-Strait Relations. *ISPI*, 293, 1-12.

Buku:

Bush, R. (2019). *From persuasion to coercion: Beijing's approach to Taiwan and Taiwan's response*. Washington, DC: Brookings Institution.

Kegley Jr, C. W., & Blanton, S. L. (2010). World Politics-Trend and Transformation (2010-2011 Edition).

- Allison, G. T. (1969). Conceptual models and the Cuban missile crisis. *American political science review*, 63(3), 689-718.
- Morgenthau, H. J. (2006). Six principles of political realism. *Classic Readings of International Relations*, 34-38.
- Leffler, M. P. (1990). National security. *The Journal of American History*, 77(1), 143-152.
- Levin, N. G. (1968). *Woodrow Wilson and world politics: America's response to war and revolution* (Vol. 309). New York: Oxford University Press.
- Buzan, B. (2008). *People, states & fear: an agenda for international security studies in the post-cold war era*. Ecpr Press.
- Gunawan, I. (2013). Metode penelitian kualitatif. *Jakarta: Bumi Aksara*, 143, 32-49.

Website:

BBC, '*China-Taiwan military tensions 'worst in 40 years'*' (daring), < <https://www.bbc.com/news/world-asia-58812100> >, diakses pada 27 Maret 2022.

Khomarul Hidayat, 'Memanas, Taiwan tolak tawaran satu negara dua sistem, China: Reunifikasi harga mati' (daring), < <https://internasional.kontan.co.id/news/taiwan-tolak-tawaran-satu-negara-dua-sistem-china-reunifikasi-tak-bisa-dihindari> >, diakses pada 02 April 2022

David Brown, '*China and Taiwan: A really simple guide to a growing conflict*' (daring), < <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-59900139> > diakses pada 29 Maret 2022

'*China Makin Agresif, Taiwan Bisa Apa?*' (daring), Inews Indonesia, < <https://www.inews.id/news/internasional/china-makin-agresif-taiwan-bisa-apa> > diakses pada 02 April 2022

Reuters, '*Blinken warns of China's 'increasingly aggressive actions' against Taiwan*' (daring), < <https://www.reuters.com/world/china/blinken-warns-chinas-increasingly-aggressive-actions-against-taiwan-2021-04-11/> >, diakses pada 27 Maret 2022

Journal Of International Affairs (daring), 06 Mei 2019, < <https://www.georgetownjournalofinternationalaffairs.org/online-edition/2019/5/3/a-new-level-of-aggressiveness-recent-changes-in-xi-jinpings-formulation-of-taiwan-policy-1> >, diakses pada 27 Maret 2022.

Josep A. Bosco, *Taiwan and Strategic Security: The U.S. declarative policy on Taiwan of “strategic ambiguity” needs to change sooner rather than later,*’ (daring) 15 Mei 2015 < <https://thediplomat.com/2015/05/taiwan-and-strategic-security/> >, diakses pada 26 Maret 2022

A Policy of “*one country, two system*” on Taiwan, Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China (daring) 200, < https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/ziliao_665539/3602_665543/3604_665547/200011/t20001117_697847.html > diakses pada 19 April 2022

John Ruwwitch, *Timeline-The Rise of Chenies leaders Xi Jinping,* daring < <https://www.reuters.com/article/us-china-parliament-xi-timeline-idUSKCN1GS0ZA> > diakses pada 01 juni 2022.

LAMPIRAN

Naspub 1 : PENGARUH KEBIJAKAN LUAR NEGERI ASERTIF XI JINPING TERHADAP STABILITAS HUBUNGAN CHINA- TAIWAN

by Markysa Vebianova

Submission date: 19-Oct-2022 03:11PM (UTC+0800)

Submission ID: 1929471231

File name: Naskah_Publikasi.docx (52.61K)

Word count: 8928

Character count: 58136

Naspub 1 : PENGARUH KEBIJAKAN LUAR NEGERI ASERTIF XI JINPING TERHADAP STABILITAS HUBUNGAN CHINA-TAIWAN

ORIGINALITY REPORT

22% SIMILARITY INDEX	21% INTERNET SOURCES	6% PUBLICATIONS	15% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	2%
2	www.dqlab.id Internet Source	1%
3	journal.umy.ac.id Internet Source	1%
4	Submitted to Nanyang Technological University Student Paper	1%
5	files.osf.io Internet Source	1%
6	www.degruyter.com Internet Source	1%
7	ejournal.umm.ac.id Internet Source	1%
8	www.journal.unwira.ac.id Internet Source	1%

Submitted to Coventry University